

SINERGI

Buletin Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah • Edisi 30/Juni 2018



Ikuti
Kuis BPIW
di hal. 61

BPIW Siapkan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR**

INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU UNTUK NEGERI



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210

Email: humasbiw@gmail.com

Telp. +6221-2751 5804



Salam Sinergi

Perjalanan Buletin Sinergi telah memasuki pertengahan tahun, informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khususnya terkait Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) selalu kami sajikan untuk pembaca.

Kita tetap berkomitmen untuk menghadirkan informasi-informasi yang bermanfaat. Pada edisi 30 ini, kita kembali mengangkat isu-isu pengembangan infrastruktur terkini melalui Kabar Utama terkait penyusunan program jangka pendek 2021-2023. Dalam tema utama tersebut, dibahas beberapa hal seperti persiapan penyusunan hingga penajaman dalam hal sinkronisasi program dan pembiayaan.

Kemudian Laporan Khusus membahas mengenai *kick off* atau dimulainya proses pembuatan *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP) atau rencana induk pariwisata yang terintegrasi untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

Sejumlah berita kegiatan selama bulan Juni ditampilkan dalam rubrik Kilas BPIW. Dalam rubrik Wawancara menampilkan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto. Beberapa hal dibahas pada rubrik tersebut, salah satunya terkait kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018 ini, seperti penyusunan program prioritas tahun 2019 dan penyiapan program tahun 2020.

Pada rubrik Sosok edisi ini mengangkat profil dan ruang lingkup dari pekerjaan yang dilakukan Sosilowati, Kepala Bidang Sinkronisasi Program, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW.

Pameran Indo Water di Surabaya dan Dokumentasi terkait Halal Bihalal Kementerian PUPR ditampilkan pada rubrik Potret. Rubrik ringan Serba-serbi yang membahas mengenai tujuh monumen terkenal di tanah air yang dijadikan sebagai tujuan wisata mewarnai Buletin Sinergi edisi ini. Untuk Tips kali ini adalah mengenai kiat kiat mengembalikan semangat setelah liburan panjang.

Beberapa rubrik reguler masih tetap dihadirkan, seperti rubrik Jalan-jalan yang mengangkat mengenai Museum Nasional (Monas) Jakarta dan ulasan berita yang terbit di media massa dalam rubrik Teropong Media.

Kami berharap Buletin Sinergi edisi Juni 2018 ini dapat memenuhi harapan pembaca serta memperkaya pengetahuan dan informasi pembangunan infrastruktur bidang PUPR.

Salam hormat,

Pemimpin Redaksi

SINERGI

BULETIN BPIW

Tim Penyusun:

Pelindung:
Lana Winayanti

Pengarah:
Firman Hatorangan Napitupulu

Penasehat
Bobby Prabowo
Iwan Nurwanto
Hadi Sucahyono
Agusta Ersada Sinulingga

Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi:
P. Yudiantoro

Redaktur Pelaksana:
Shovich

Editor :
Hendra Djamal
Mutri Batul Aini

Tim Pembuat Artikel:
Indira Dwi Kusumatuti
Daris Anugrah
Alis Listalatu
Rian Farhan
Fitri Selva

Sekretariat:
Untung Priyono
Nur Wahyu

Diterbitkan oleh:
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)
Kementerian PUPR

Alamat Redaksi:
Gedung G, BPIW Lantai 1
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
Email: humasbpiw@gmail.com, humasbpiw@pu.go.id
Website: bpiw.pu.go.id
No. Telp. +6221-2751 5804

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:
humasbpiw@gmail.com, humasbpiw@pu.go.id

Design : Heri Hito
Infografis & Kartunis : Ajeng Ayuning Pertiwi



04 **Kabar Utama:**
BPIW Siapkan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan



52 **Serba Serbi**
7 Monumen Terkenal di Tanah Air

Edisi30 / Juni 2018

daftar isi



12 **Wawancara:**
Ir.Iwan Nurwanto, M.Soc, Sci :
Optimalisasi Peran BPIW

30 **Lapsus:**
Penyusunan ITMP Borobudur Mulai
Dilaksanakan



56 **Teknologi:**
Teknologi Aspal Karet

59 **Potret:**
Pameran Kementerian PUPR di Indo
water, Surabaya

Penyusunan Program Jangka Pendek

BPIW Siapkan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menyusun Pembangunan Jangka Pendek 2021-2023. Dalam menyusun program tersebut, diperlukan penajaman dalam hal sinkronisasi program dan pembiayaan.



Flyover Dermoleng Brebes Jawa Tengah

Sumber: BPIW



Pembahasan mengenai penajaman ini telah dilakukan pada 4 hingga 6 Juni lalu, dengan melibatkan seluruh pusat, sekretariat BPIW dan unit organisasi (unor) terkait seperti Ditjen Bina Marga, Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Perumahan.

Plt. Kepala BPIW Lana Winayanti menyatakan langkah tersebut merupakan upaya mewujudkan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR melalui proses perencanaan dan pemrograman pembangunan efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel.

“Kita harapkan proses penajaman sinkronisasi program dan pembiayaan bersumber dari dokumen perencanaan dan pemrograman yang semakin berkualitas, dan proses sinkronisasi pemrograman maupun pembiayaan yang semakin baik,” ujar Lana.

Ia juga memandang pertemuan tersebut sangat penting sebagai upaya BPIW menjalin koordinasi internal dalam mempersiapkan program jangka pendek pembangunan infrastruktur sektor PUPR. Koordinasi yang dilakukan dengan unor merupakan langkah awal konsolidasi perencanaan dan pemrograman dalam mengantisipasi periode

RPJMN 2020-2024. Hal ini untuk mewujudkan suatu keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan/ pengembangan infrastruktur lainnya.

Menurut Lana, BPIW perlu memfokuskan kembali kebijakannya dalam hal penyediaan kebutuhan tempat tinggal berupa rumah susun (rusun). Pasalnya, berdasarkan evaluasi paruh waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menunjukkan bahwa *backlog* perumahan atau kekurangan tempat tinggal mencapai 7.324.392 unit.

Disamping itu, semakin banyak populasi akan berakibat pada semakin besar kebutuhan akan pangan. Untuk itu menurut Lana dukungan sektor PUPR pada ketahanan pangan akan semakin meningkat seperti penyediaan waduk, irigasi, dan embung. Dikatakannya, kedepan, pemenuhan target RPJMN 2015-2019 seperti 49 waduk, perlu terus didorong.

Selain itu, sektor industri manufaktur dan pariwisata, kedepan diarahkan menjadi penggerak perekonomian. Kebutuhan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur seperti pembangunan jalan dan jalan tol

“Kita harapkan proses penajaman sinkronisasi program dan pembiayaan bersumber dari dokumen perencanaan dan pemrograman yang semakin berkualitas, dan proses sinkronisasi pemrograman maupun pembiayaan yang semakin baik,” ujar Lana.



Rusunawa di Pasuruan Jawa Timur.

Sumber: BPIW

akan semakin meningkat. Berdasarkan Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017, pembangunan jalan tol menunjukkan kinerja yang baik bahkan telah melampaui target akhir RPJMN. Ia menilai *refocusing* pembangunan jalan perlu untuk didorong.

Kemudian, prioritas pembangunan subsektor-subsektor transportasi, termasuk angkutan jalan raya, jalan dan jembatan, kedepan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan angkutan darat, angkutan udara, dan angkutan laut dalam rangka menurunkan biaya logistik.

Lana juga menekankan beberapa hal yang perlu diperhatikan BPIW. Pertama, melakukan upaya antisipasi perubahan lingkungan strategis dan kebijakan pembangunan. Langkah antisipasi itu dalam proses perencanaan dan pemrograman, sehingga BPIW tidak ketinggalan momentum-momentum penting seperti transisi periode pemerintahan dan proses penganggaran.

Kedua, peningkatan kualitas perencanaan dan pemrograman untuk arahan unor termasuk juga fokus terhadap penanganan program yang bersifat *asset management*

terutama untuk kawasan-kawasan prioritas, contohnya sungai, danau kritis, irigasi kritis dan juga jalan untuk jalur logistik suatu wilayah.

Sejauh ini, dukungan infrastruktur sektor PUPR sudah mengarah pada perlindungan kawasan, seperti penanganan terhadap pembangunan jalan di Pulau Kalimantan yang melalui lahan gambut. Terkait hal itu Kementerian PUPR telah melakukan beberapa hal, salah satunya membuat saluran di sepanjang jalan yang melalui lahan gambut sebagai penahan, bila ada api yang menjalar ke permukiman warga.

Poin ketiga yang harus diperhatikan BPIW menurut Lana adalah peningkatan komunikasi dan sosialisasi seluruh produk perencanaan dan pemrograman BPIW, sehingga *output* nya bermanfaat dan dapat meningkatkan eksistensi BPIW.

Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto menyatakan untuk penyusunan program jangka pendek terkait pembangunan infrastruktur PUPR, dilakukan melalui berbagai proses untuk mendapatkan data/informasi awal yang menjadi *profiling*

Dukungan infrastruktur sektor PUPR sudah mengarah pada perlindungan kawasan, seperti penanganan terhadap pembangunan jalan di Pulau Kalimantan yang melalui lahan gambut.

KAWASAN-KAWASAN YANG PERLU MENDAPATKAN PRIORITAS DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PUPR DI PULAU SUMATERA HINGGA 2045

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional



suatu kawasan, sehingga dapat dirumuskan kebutuhan programnya.

“Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR berkomitmen untuk mengoptimalkan produk-produk perencanaan yang sudah dihasilkan oleh BPIW sebagai sumber yang sudah melalui kajian dan analisis yang baik,” tegas Iwan.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa indikasi program pembangunan infrastruktur prioritas untuk setiap kawasan berdasarkan hasil dokumen perencanaan/produk perencanaan yang meliputi Rencana Induk Pulau (RIP) dari Pusat Perencanaan Infrastruktur, *Masterplan* dan *Development Plan* (MPDP) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dan Kawasan Strategis dari Pusat Pengembangan Kawasan Strategis. Dokumen perencanaan/produk perencanaan lainnya adalah MPDP

Kawasan Perkotaan dan Perdesaan dari Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan.

Selain dokumen tersebut, digunakan juga program-program prioritas yang belum dialokasikan anggarannya karena keterbatasan pendanaan pada periode sebelum 2021-2023 sebagai sumber program yang disusun.

Input data yang diperlukan dalam penyusunan program jangka pendek itu adalah RPJMN, RKP, Rencana Strategis (Renstra) PUPR 2015-2019, Rencana Induk Terpadu (RIT) Pulau/Kepulauan, dan antar Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Input data lain yang diperlukan adalah Direktif Presiden, Direktif Menteri dan Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Hal lain yang tidak kalah penting dalam

Hal lain yang tidak kalah penting dalam penyusunan program jangka pendek adalah perlunya tahapan justifikasi hasil analisis terkait tingkat prioritas indikasi program, dalam dokumen perencanaan.





Jalan Tol - Semarang - Bawen - Solo - Salatiga

Sumber: PUPR

penyusunan program jangka pendek adalah perlunya tahapan justifikasi hasil analisis terkait tingkat prioritas indikasi program, dalam dokumen perencanaan. "Sehingga kita dapat melakukan *ranking* dalam program-program tersebut agar keterbatasan sumber daya kita dapat optimal," tutur Iwan.

Tahapan Penyusunan Program Jangka Pendek 2021-2023

Proses penyusunan program jangka pendek dilakukan dengan beberapa tahap.

Proses penyusunan tersebut diawali dengan persiapan. Dalam tahap persiapan ini dilakukan analisis kelayakan program seperti kawasan terdukung, fungsi kawasan, jangka waktu berfungsinya kawasan, potensi dari kawasan, dan tantangan serta isu kawasan.

Dalam tahap persiapan ini juga dilihat mengenai kriteria program seperti lokasi program, waktu pelaksanaan program, volume program, besaran biaya program, skema Pembiayaan (APBN, DAK, dan KPBU), dan kewenangan (Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota/

Swasta), serta *Readiness Criteria (Feasibility Study, Detail Engineering Desain, Dokumen Lingkungan, dan ketersediaan lahan)*.

Kemudian dilakukan Rumusan *Draft Program Jangka Pendek Keterpaduan Pengembangan Kawasan dan Infrastruktur*. Selanjutnya juga dilakukan koordinasi awal dengan Internal BPIW untuk penajaman *draft* arahan program jangka pendek.

Koordinasi awal dilakukan dengan unor internal Kementerian PUPR untuk penajaman *draft* arahan program program jangka pendek seperti dengan Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan dan Pembiayaan.

Tahap persiapan penyusunan program jangka pendek berikutnya adalah rapat koordinasi di 34 Provinsi. *Stakeholder* yang terlibat yakni Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) di 34 Provinsi, Bappeda Kab/Kota, dan Dinas PU Provinsi dan Kab/Kota. *Stakeholder* lain yang dilibatkan yakni Balai SDA, BM, Satker CK, SNVT PnP, unor Pusat dan BPIW.

Koordinasi awal juga dilakukan dengan unor internal Kementerian PUPR untuk penajaman *draft* arahan program program jangka pendek seperti dengan Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan dan Pembiayaan.



Pengembangan Jaringan Sistem Air Limbah Perpipaan Kota Surakarta

Sumber: PUPR

Rapat koordinasi ini dilakukan dengan metode *desk*. Dalam metode *desk* dilakukan klarifikasi data yang mencakup beberapa hal yakni penyesuaian nama kegiatan sesuai nomenklatur setiap unit organisasi, penajaman deliniasi kawasan/dukungan kawasan, sinkronisasi lokasi pelaksanaan kegiatan, dan penajaman kewenangan.

Selanjutnya dilaksanakan penajaman skema pembiayaan, sinkronisasi besaran kegiatan, sinkronisasi waktu pelaksanaan kegiatan, keterpaduan antar sektor, dan pemenuhan *readiness criteria* sesuai dengan kriteria setiap unor.

Kemudian dilakukan Validasi dan Finalisasi Program. Bentuk validasinya adalah validasi internal dan eksternal untuk finalisasi matriks program jangka pendek. Langkah lanjutan

Indikasi program 2021-2023 di kawasan prioritas untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, maka akan dilakukan revitalisasi rumah tidak layak huni Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu pada indikasi program jangka pendek tersebut adalah rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Maja di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

berupa *Entry Data Program* ke Sistem Informasi Pemrograman (SIPro). Dari langkah-langkah yang dilakukan tersebut, maka *output* yang diharapkan dari program jangka pendek adalah Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR.

Dalam menyusun program jangka pendek 2021-2023 ini dibutuhkan beberapa hal yakni Isu strategis pengembangan wilayah/kawasan, kondisi Infrastruktur yang mendukung wilayah/kawasan, dan arahan pengembangan wilayah/kawasan. Selain itu dibutuhkan rencana pengembangan wilayah/kawasan, dan indikasi program infrastruktur prioritas untuk mendukung pengembangan wilayah/kawasan.

Banyak program yang menjadi indikasi pembangunan infrastruktur periode 2021-2023, seperti Pembangunan Jalan Tol Kota Langsa – Kota Banda Aceh. Pembangunan jalan tol tersebut mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Banda Aceh dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Lhokseumawe.

Indikasi program 2021-2023 di kawasan prioritas untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, maka akan dilakukan revitalisasi rumah tidak layak huni Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu pada indikasi program jangka pendek tersebut adalah rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Maja di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.



Ilustrasi kawasan perkotaan

Sumber: Istimewa

Tantangan Penyusunan Program Kedepan

Dalam menyusun program kedepan, dihadapkan pada beberapa tantangan seperti strategi untuk penyusunan program dengan kondisi kebijakan perencanaan pembangunan yang masih dalam proses teknokratik (RPJMN).

Selain itu, ada tantangan berupa standarisasi kualitas dokumen perencanaan yang merupakan produk dari tiga Pusat di BPIW yakni Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, dan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan sebagai *input* dalam proses penyusunan program.

Selanjutnya, tantangan berupa stahapan konsinyasi yang dilakukan sebagai langkah awal dalam koordinasi penyusunan program yang melibatkan berbagai *stakeholder*

- baik dari unor, kementerian/lembaga, dan
- Pemerintah Daerah.
- *Output* penyusunan program ke depan
- diharapkan tidak hanya memberi arahan
- kegiatan yang bersifat *new development*, tapi
- juga mampu untuk menyusun program yang
- bersifat *asset management* khususnya untuk
- kawasan yang membutuhkan penanganan
- prioritas nasional.
- Tantangan lain adalah berhubungan dengan
- masalah proses penyusunan program. Proses
- tersebut bersifat paralel dan sinkron dengan
- proses penyusunan Renstra dan RPJMN 2020-
- 2024.
- Semua tantangan itu dapat diatasi dengan
- koordinasi dan keterpaduan baik *internal*
- maupun *eksternal* Kementerian PUPR. **(Bowo/**
- **Mangapul/Tim Redaksi)**

Output penyusunan program ke depan diharapkan tidak hanya memberi arahan kegiatan yang bersifat *new development*, tapi juga mampu untuk menyusun program yang bersifat *asset management* khususnya untuk kawasan yang membutuhkan penanganan prioritas nasional.



Sumber: Dok.BPIW

Optimalisasi Peran BPIW

Ir. Iwan Nurwanto, M.Soc, Sci

Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR

Peran Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perlu dioptimalkan. Menurut Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR BPIW Kementerian PUPR, Ir. Iwan Nurwanto, M.Soc, Sci, hal itu perlu dilakukan agar proses perencanaan dan pemrograman BPIW benar-benar menjadi

acuan bagi seluruh *stakeholders* terkait dengan pembangunan infrastruktur. Hal itu disampikannya saat dibincangi "Buletin Sinergi" beberapa waktu lalu. Ia juga menyampaikan beberapa kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan unit kerja yang dipimpinnya. Simak perbincangan selengkapnya berikut ini.

Kegiatan apa yang menjadi fokus Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR yang sedang dikerjakan dan akan diselesaikan tahun 2018 ini?

Pada tahun 2018, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur PUPR melaksanakan beberapa kegiatan seperti Penyusunan Program Jangka Pendek 2021-2023, Penyusunan Program Prioritas untuk Tahun 2019 melalui kegiatan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) dan menyiapkan program tahunan 2020. Selain itu kita juga melaksanakan evaluasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR pada tahun 2018.

Saat ini Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR sedang menyusun Program Pembangunan Infrastruktur PUPR Jangka Pendek 2021-2023. Mengapa perlu menyusun program tersebut?

Kita akan segera memasuki tahun politik dan merupakan transisi menuju periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV yang saat ini sedang disusun secara teknokratik oleh Bappenas. Proses tersebut merupakan langkah awal konsolidasi perencanaan dan pemrograman mengantisipasi periode RPJMN 2020-2024, untuk mewujudkan suatu keterpaduan

pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan/ pengembangan infrastruktur lainnya.

Proses tersebut merupakan rangkaian tahapan dalam mewujudkan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR melalui proses perencanaan dan pemrograman pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel. Kita harapkan proses tersebut bersumber dari dokumen perencanaan dan pemrograman yang semakin berkualitas, dan proses sinkronisasi pemrograman dan pembiayaan yang semakin baik.

Apa saja yang dilakukan dalam menyusun Program Jangka Pendek tersebut?

Untuk penyusunan Program Jangka Pendek pembangunan infrastruktur PUPR dilakukan berbagai proses untuk mendapatkan data/informasi sebagai *profiling* suatu kawasan, sehingga dapat dirumuskan arahan programnya.

Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR berkomitmen untuk mengoptimalkan produk-produk perencanaan yang sudah dihasilkan oleh BPIW sebagai sumber yang kami anggap sudah melalui kajian dan analisis yang baik.

Indikasi program pembangunan infrastruktur

“Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR berkomitmen untuk mengoptimalkan produk-produk perencanaan yang sudah dihasilkan oleh BPIW sebagai sumber yang kami anggap sudah melalui kajian dan analisis yang baik”.



Iwan Nurwanto saat rapat Program Jangka Pendek

Sumber: Dok. BPIW

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KEPUASAN PELANGGAN Pelaksanaan Pra-Konreg Tahun 2018

	Variabel Penilaian	Jumlah Responden yang menyatakan <i>Baik</i> dan <i>Sangat Baik</i>			
		Semarang	Kendari	Banjarmasin	Jambi
1	Kejelasan materi arahan	95,8%	95,1%	100%	98,4%
2	Penyediaan Fasilitas Meeting	86,9%	89,5%	83,8%	83,3%
3	Efektifitas waktu penyelenggaraan	80,3%	91,2%	93,6%	89,1%
4	Pelayanan Panitia Penyelenggara	88,7%	97,1%	96,2%	98,4%
5	Kemudahan Sistem Informasi Program	77,5%	87,3%	97,4%	89,1%



Penilaian Akhir dari Responden (Capaian Kinerja Mutu)	88% Menyatakan Baik/Puas	93,5 % Menyatakan Baik/Puas	93,5% Menyatakan Baik/Puas	91.5% Menyatakan Baik/Puas
		19,7% <i>tidak puas</i> dengan Efektifitas Waktu Penyelenggaraan Pra Konregi	12,8% <i>tidak puas</i> dengan Sistem Informasi Program	28.2% <i>tidak puas</i> dengan Ruang Meeting

* : Evaluasi dilakukan berdasarkan data kuesioner dari 315 responden

prioritas untuk setiap kawasan berdasarkan hasil dokumen perencanaan/Produk Perencanaan yang meliputi Rencana Induk Pulau (RIP) dari Pusat Perencanaan Infrastruktur, *Masterplan* dan *Development Plan* (MPDP) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dan Kawasan Strategis dari Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, serta MPDP Kawasan Perkotaan dan Perdesaan dari Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan.

Selain dokumen - dokumen tersebut, digunakan juga program-program prioritas yang belum dialokasikan anggarannya karena keterbatasan pendanaan pada periode sebelum 2021-2023 sebagai sumber program yang disusun.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya tahapan justifikasi hasil analisis terkait tingkat prioritas indikasi program dalam dokumen perencanaan sehingga kita dapat melakukan ranking dalam program-program

tersebut agar keterbatasan sumber daya kita dapat optimal.

Secara teknis prosesnya mencakup rapat koordinasi (rakor) internal, rakor dengan unit organisasi (unor), rakor dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan juga koordinasi dengan semua provinsi yang pelaksanaannya dipadatkan di 11 lokasi rapat yang melibatkan Bappeda Provinsi, Balai/Satker di Lingkungan Kementerian PUPR.

“Proses penyusunan program merupakan proses yang paralel dan sinkron dengan proses penyusunan Renstra dan RPJMN 2020-2024. Kita akan melaksanakannya secara bersama-sama, sehingga ketika kabinet untuk masa bakti 2020-2024 terbentuk, tidak terjadi kehilangan momen”.

Apa tujuan yang diharapkan dari program jangka pendek itu?

Outputnya tentu saja matriks Program Jangka Pendek Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan

Infrastruktur PUPR. Dengan tingkat validitas dan akurasi yang baik yang nantinya akan menjadi bahan penyusunan program tahunan dan siap ditajamkan kembali dalam forum-forum seperti Pra Konreg, Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dan Penyusunan Program Dana Alokasi Khusus (DAK). Bahkan dalam penyiapan program Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Saat ini Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR sedang menyusun Renstra Teknokratik 2020-2024. Bagaimana menselaraskan Program Jangka Pendek 2021-2023 dengan Renstra Teknokratik tersebut?

Tentu kita tetap mengikuti ketentuan dan peraturan yang

berlaku dalam penyusunan rencana dan program. Proses penyusunan program merupakan proses yang paralel dan sinkron dengan proses penyusunan Renstra dan RPJMN 2020-2024. Kita akan melaksanakannya

secara bersama-sama, sehingga ketika kabinet untuk masa bakti 2020-2024 terbentuk, tidak terjadi kehilangan momentum dalam penyusunan program. Artinya secara teknokratik substansi program yang kita siapkan benar-benar selaras dengan Renstra PUPR ke depan.

Yang dimaksud dengan momentum disini adalah bagaimana dari sisi pemrograman kita dapat memasukkan seluruh prioritas program untuk jangka waktu 2020-2024 ke dalam dokumen- dokumen teknokratik RPJMN IV yang nantinya akan diacu oleh Renstra PUPR.

Kita harapkan *output* dari proses paralel dan iteratif dengan Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR sudah dapat digunakan dalam proses pemrograman tahun 2019 (Pra Konreg dan Konreg), di mana kita sudah punya program untuk tahun pertama RPJMN IV yaitu program tahunan 2020. Hal ini berarti proses selama tahun 2018 sangat strategis dan sangat menentukan untuk pembangunan lima tahun ke depan.

Bagaimana tindak lanjut program yang sudah dijalankan tahun sebelumnya?

Program yang telah dijalankan sebelumnya dapat diartikan sebagai program yang sepenuhnya dialokasikan pendanaannya (dianggarkan melalui berbagai sumber seperti APBN, APBD, KPBU dan lain-lain termasuk didalamnya melalui DAK).

Untuk periode 2015-2019 kita akan melakukan evaluasi bagaimana capaiannya terutama untuk dapat melihat apakah kawasan-kawasan strategis yang diprioritaskan dalam periode tersebut sudah tuntas penanganannya dan sudah memberikan *impact* bagi masyarakat dalam bentuk kontribusi terhadap ekonomi. Hasil evaluasi menjadi dasar

bagi kita untuk menentukan prioritas penanganan kawasan strategis yang akan kita ajukan untuk periode pemerintahan 2020-2024.

Bagaimana pula dengan tindak lanjut dari Pra Konreg?

Hasil program Pra Konreg dikategorikan berupa stok dan *baseline*. Stok merupakan program yang belum prioritas atau merupakan program yang belum memiliki *readiness criteria* yang lengkap sehingga tahun pembangunan diundur, dan dalam hal tersebut maka *readiness criteria*-nya langsung diprogramkan, sedangkan *baseline* adalah program prioritas yang telah memiliki *readiness criteria* yang lengkap dan prioritas untuk dibangun.

“Untuk periode 2015-2019 kita akan evaluasi bagaimana capaiannya terutama untuk dapat melihat apakah kawasan-kawasan strategis yang diprioritaskan dalam periode tersebut sudah tuntas penanganannya dan sudah memberikan impact bagi masyarakat”

Program yang masuk *baseline* akan dilakukan penajaman kembali oleh sektor pada Konsultasi Regional (Konreg) sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan, dilanjutkan dengan Trilateral *Meeting* antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR untuk dibahas lebih

lanjut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) hingga disusunnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Residu dari hasil penajaman tersebut (program yang tidak masuk karena keterbatasan anggaran) akan diajukan untuk diprogramkan kembali pada tahun berikutnya.

Bagaimana pandangan Bapak mengenai keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR hingga saat ini, merujuk dari hasil evaluasi keterpaduan yang dilakukan pusat Bapak?

Jika melihat hasil evaluasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR Tahun Anggaran 2015 – 2017, maka untuk tingkat keterpaduan kawasan, antar kawasan, dan WPS sudah cukup meningkat, hal ini mengisyaratkan bahwa pelaksanaan pembangunan dalam rentang waktu tersebut sudah



“Ke depan perlu dibangun suatu sistem atau tool yang secara komprehensif mampu mengukur keterpaduan dalam konteks yang lebih tangible atau nyata. Artinya secara objektif dapat diukur dan dirasakan masyarakat manfaat/benefit-nya dalam skala dan deliniasi kawasan strategis atau wilayah prioritas yang ditangani dalam kurun waktu tertentu”

Sumber: Dok. BPIW



Sumber: Dok. BPIW

mengikuti dokumen perencanaan seperti dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Strategis (Renstra), dan dokumen pemrograman.

Namun demikian ke depan perlu dibangun suatu sistem atau *tool* yang secara komprehensif mampu mengukur keterpaduan dalam konteks yang lebih *tangible* atau nyata. Artinya secara objektif dapat diukur dan manfaat/*benefitnya* dirasakan masyarakat, dalam skala dan deliniasi kawasan strategis atau wilayah prioritas yang ditangani dalam kurun waktu tertentu.

Tuntutan *stakeholders* ke depan semakin tinggi, sehingga kita juga harus mampu mengantisipasinya. Hasilnya juga dapat diacu dalam penentuan *ranking* PKPD misalnya yang diharapkan mampu mendorong daerah memprioritaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Seperti apa hasil evaluasi keterpaduan selama ini?

Perhitungan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR yang dilakukan oleh Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR mencakup kepada tiga proses pembangunan yakni perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan.

Ketiga proses pembangunan ini menjadi indikator utama keterpaduan, sehingga dapat diartikan bahwa

untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR diperlukan sinergi dan efisiensi terhadap ketiga proses pembangunan tersebut.

Berdasarkan hasil perhitungan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR Tahun Anggaran 2015 – 2017 yang mencakup keterpaduan kawasan, antar kawasan, dan WPS sudah cukup meningkat. Hal ini mengisyaratkan bahwa pelaksanaan

Tuntutan stakeholders ke depan semakin tinggi, sehingga kita juga harus mampu mengantisipasinya. Hasilnya juga dapat diacu dalam penentuan ranking PKPD misalnya yang diharapkan mampu mendorong daerah memprioritaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

pembangunan dalam rentang waktu tersebut sudah mengikuti dokumen perencanaan seperti dokumen RTRW dan Renstra. Kemudian juga dokumen pemrograman.

Mulai tahun anggaran 2017 untuk proses pemrograman melalui pelaksanaan Pra Konreg 2016 sudah mulai mengemban tema keterpaduan kawasan dengan dukungan infrastruktur PUPR. Sehingga kinerja keterpaduan infrastruktur PUPR dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terus meningkat.

Apa yang menjadi kendala dan bagaimana solusinya dalam pelaksanaan tugas pemrograman dan evaluasi keterpaduan infrastruktur PUPR?

Beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan tugas dan fungsi misalnya kualitas dokumen perencanaan yang dijadikan rujukan dalam proses penyusunan program masih sangat bervariasi, sehingga indikasi program yang didapatkan belum seragam sesuai dengan standar pemrograman.

Selain itu ada juga kendala terkait pemenuhan *readiness criteria* untuk setiap program yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu kita terus mendorong proses koordinasi dengan *stakeholders* terkait agar kualitas dokumen perencanaan dan pemrograman yang disusun semakin baik.

Kemudian juga perlu suatu upaya mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah misalnya dalam konteks koordinasi pembangunan infrastruktur di daerah. Kendalanya adalah dalam penyediaan *readiness criteria* yang di dalamnya ada peran pemerintah daerah, perlu didorong partisipasi dan komitmen daerah sesuai peraturan yang berlaku.

Hal ini penting baik dalam penyediaan *readiness criteria* yang sifatnya

Arah Pembangunan Wilayah



dokumen seperti *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED). Penyediaan lahan juga sering menjadi kendala pembangunan. Selain itu keterbatasan dana dari Pemerintah Pusat perlu diatasi dengan mendorong daerah semakin inovatif mencari sumber dana non- APBN.

Apa terobosan Bapak tahun ini agar hasil dari Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dapat lebih optimal dan output pekerjaannya dapat diimplementasikan?

Intinya adalah komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik, koordinasi akan tercipta karena ada *trust* atau kepercayaan. Selama Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dapat meyakinkan bahwa kita menghasilkan *output* secara subjektif dan mendiseminasikannya secara terbuka, transparan dan akomodatif, kita harapkan seluruh *client* kita seperti unor di lingkungan Kementerian PUPR dan *stakeholders* lainnya memiliki komitmen dan konsistensi dalam mewujudkan pemrograman yang berkualitas untuk mendorong pengembangan wilayah.

Dalam konteks evaluasi juga, kita tidak dalam posisi memberikan *judgement* atau penilaian terhadap pelaksanaan program, namun lebih pada mengawal dari kegiatan yang sudah kita programkan dan sepakati, sehingga benar-benar dapat diimplementasikan di lapangan.

Khusus Untuk Program Jangka Pendek, terobosannya seperti apa?

Untuk Program Jangka Pendek, terobosannya adalah membereskan dari sisi kebijakan dulu. Artinya indikasi

program yang dihasilkan produk perencanaan, kita koordinasikan dulu di internal PUPR (direktorat terkait) sebelum kita bawa ke daerah. Jadi kita mengupayakan meminimalisir permasalahan dari sisi kebijakan sektoral ke depan. Sehingga nantinya diharapkan program dalam dokumen perencanaan BPIW juga bisa mengarahkan penentuan prioritas unor yang selama ini dimulai dari arahan Eselon I (direktorat perencanaan).

Untuk program tahunan kita akan tetap meningkatkan dan membangun Sistem Informasi Pemrograman (SIPro) sehingga semakin responsif terhadap peningkatan kebutuhan/harapan para *stakeholders*. Kita harapkan SIPro sebagai sistem

pemrograman dapat semakin kompatibel dengan sistem yang ada di unor bahkan di tingkat K/L.

Apa yang Bapak harapkan terhadap BPIW kedepan?

Kita sangat berharap peran BPIW semakin optimal melalui dukungan Peraturan Menteri (Permen) yang mengikat proses perencanaan dan pemrograman di internal Kementerian PUPR.

Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan komitmen bersama yang dituangkan dalam kesepakatan program seperti melalui Pra Konreg dan Konreg dapat dikawal bersama hingga proses penganggaran, termasuk juga pada tahap pelaksanaan.

Kita dukung dan dorong terbitnya aturan tersebut, sehingga peran BPIW khususnya pada proses perencanaan dan pemrograman benar-benar menjadi acuan bagi seluruh *stakeholders*. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung akan mendorong kita selalu meningkatkan kualitas produk perencanaan dan pemrograman kita ke depan. **(Mangapul/Bowo/Hadian/Tim Redaksi)**

"Kita sangat berharap peran BPIW semakin optimal melalui dukungan Peraturan Menteri (Permen) yang mengikat proses perencanaan dan pemrograman di internal Kementerian PUPR. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan komitmen bersama yang dituangkan dalam kesepakatan program seperti melalui Pra Konreg dan Konreg"

Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

Kami mengumpulkan guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengan Kementerian PUPR. Guntingan berita tersebut kami sarikan dari 5 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Investor Daily, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini dua potongan pemberitaan terpilih pada bulan Juni.

Kliping berita BPIW dapat di download di: bpiw.pu.go.id/publication/scrapbook



Tak dapat dipungkiri bahwa pariwisata Nusa Tenggara Barat saat ini dalam usaha untuk melaju bersama kawasan-kawasan wisata lainnya. Berbagai pembangunan dan pengembangan dilakukan agar bisa memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

redaksi@bpiw.com

Sangatlah salah satu sektor yang memiliki dampak yang luas terhadap industri lainnya, pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi baru setelah menjadi bagian dari pertumbuhan di atas 50%.

Industri kreatif, merupakan salah satu yang akan ikut mendorong pemulihan pertumbuhan pariwisata. Dengan atakut dan pengalihan hingga berbagai macam inovasi maka dari industri kreatif ini bisa turut mendorong kemajuan industri lain.

Berbagai waktu lalu dalam kepengangan ke EKE Mandailing, Menteri Pariwisata dan UKM Agus Gede Nugroho, Pengusaha pariwisata harus bisa meningkatkan daya tarik lokal dengan cara mengembangkan UMKM yang bisa menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempat.

Salah satu yang menjadi tantangan Pengusaha, masyarakat sebagai penggerak utama usaha kreatif perlu memiliki pemahaman bagaimana cara melakukan pemasaran yang baik dan efektif. Selain itu, cara para pedagang di kawasan wisata khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB) ikut dengan cara "menedang" wisatawan. Perihal tidak akan pengi jika barang

dagangan mereka dibeli oleh wisatawan yang sudah "biasa" "Anda seperti ini perlu diubah dengan pola-pola penjualan yang menarik dan penuh semangat. Prinsip yang nantinya justru membuat orang tidak merasa sebalnya," ujar Pengusaha.

Kemampuan berkomunikasi dan berinovasi pun menjadi hal yang penting ketika menjalankan sebuah bisnis dalam kreatif dan seni.

Untuk Dinas Kelautan Nasiona Danah (Dekasnas) NTB Erica Zamri lebih mengemukakan bahwa komunikasi dan inovasi perlu juga dibidang dari kemampuan memaksimalkan teknologi.

Erica mengatakan, menjadi pengusaha di NTB saat ini harus terus ditingkatkan agar menjadi pionir untuk bagi para konsumen.

"Lebih pengusaha yang memiliki kreativitas yang sangat baik, parcel sebagai pribadi dan sosial dalam membangun UMKM yang bisa menjadi peluang yang sangat penting bagi para konsumen," ujar Erica.

Dengan modal tersebut, Lurah Erici, akan dapat memberikan cita-pendek sehingga konsumen yang berasal dari luar daerah akan datang lagi dan menjadikan NTB sebagai pilihan utama untuk berbelanja.

Selain itu, Erici juga mengajak pemilik usaha memaksimalkan media sosial sebagai-bidangnya khususnya dalam mendukung industri kreatif dan memajukan pengembangan

bisnis.

Di NTB sendiri, industri dibedakan dalam tiga kelompok besar yaitu industri kewan, industri agro, dan industri kreatif dan kreatif. Saat ini, Dinas Perindustrian NTB terus berupaya memajukan dan memajukan tiga-tiga potensial untuk industri kreatif dan kreatif.

"Setelah satu tahun penuh dengan Timas Pedagogis, kami tengah melakukan penelitian untuk lebih lanjut mengenai potensi dari industri kreatif ini agar bisa digunakan untuk pengembangan dan pengajaran lebih lanjut," ujar Kepala Dinas Perindustrian NTB, Raji Eva Nuradnaningsih.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian NTB pada 2016, cabang industri dengan jumlah unit usaha yang tertinggi adalah sektor kerajinan dengan 33.213 unit usaha yang mampu menyerap 62.957 orang tenaga kerja.

Namun, dari jumlah keseluruhan unit usaha industri kerajinan, baru 679 unit yang merupakan industri formal dalam arti memiliki izin usaha. Sisanya, masih berupa industri informal.

Pada 2016, Timas Perindustrian juga mencatat nilai investasi di sektor kerajinan hingga Rp900 miliar. Angka ini terus meningkat sejak 2004 meskipun dengan pertumbuhan yang lambat. Bahkan baru saja, nilai produksi di sektor kerajinan pada 2016 sebesar Rp1,1 triliun.

MATI SILIR

Raji Eva menyebut, salah satu yang menjadi fokus hingga 2019 adalah proses pengembangan industri kreatif agar mampu memajukan berbagai-bidangnya. Dia juga menambahkan, salah satu yang menjadi sasaran untuk pengembangan adalah kerajinan

untuk ritel-online dan layanan untuk pengunjung di area hotel dan kawasan wisata.

Raji Eva menyatakan, meskipun memiliki potensi yang besar, industri kreatif di NTB masih minim akan inovasi dan pengembangan produk. Hal ini membuat beberapa industri kreatif yang ada masih mati.

"Bisa kita lihat di Banyuwangi yang menjadi pasar terbesar. Bahkan, ada tidak ada, harus dalam kadar ini sudah mulai menurun," ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya tidak bisa serta merta memunculkan berbagai produk dari dalam industri kreatif di NTB. Pasalnya, while di Banyuwangi, Lombok Barat, Eva juga menyebut masih ada beberapa titik lola yang menjadikan produk sebagai salah satu kerajinan untuk dijual.

Pihaknya lebih melakukan pendekatan dengan para pengrajin agar bisa menjadi sumber produk. Hal ini juga bisa meningkatkan kreativitas daya yang membuat berbagai produk yang industri kreatif saat NTB.

"Pilih untuk pengembangan produk-produk inovatif. Seperti sektor wisata, tidak hanya mengandalkan kreativitas, tetapi dari kata tersebut bisa dijadikan seperti, ini, atau lagi, jadi untuk proses pemasarannya juga bisa lebih luas," papar Eva.

Minimnya kreativitas untuk industri kreatif di NTB juga diakui oleh Pengusaha, khususnya dengan Dinas Industri dan Kawasan. Menurutnya, salah satu yang membuat lambatnya perkembangan industri kreatif di NTB adalah keterbatasan untuk melakukan inovasi produk.

"NTB punya peluang untuk berkembang di industri kreatif.

Ada mitra yang tumbuh secara alami, terutama, ini belum merupakan pola yang tepat untuk mengembangkannya seperti apa. Saya rasa tantangan terbesar yang dihadapi itu dari inovasi," ujarnya.

INTEGRASI KAWASAN

Pemangajin merupakan hal yang sangat penting untuk industri kreatif dengan pariwisata tidak hanya dengan cara memajukan dan memajukan produk yang dihasilkan oleh industri kreatif kepada wisatawan.

Menurutnya, akan lebih baik jika ada integrasi kawasan sehingga akan menjadi produk, wisatawan yang berkunjung juga bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda.

"Industri kreatif tidak hanya produknya melainkan ada sebuah komposisi kawasan yang terintegrasi. Kita pikir bisa ditambah, selain wisatawan, kita bisa juga menambahkan untuk masyarakat lokalnya," ujar Purnawati.

PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang merupakan pengelola kawasan Mandalika pun telah menyiapkan Mandalika Base yang menjadi zona usaha ritel, hotel, dan menengah guna memajukan produknya.

Tentu ini akan dibarengi di zona lain sebesar 2,5 kilometer dan direncanakan dapat menampung sekitar 300 pekerja UMKM.

Direktur Utama ITDC Abdulrahman M. Mawardi mengatakan, para pelaku usaha di zona ini akan diperlakukan berbeda dari UMKM lokal yang selama ini telah berjalinan di kawasan Mandalika. Saat ini, jayanya baik perdagangan Mandalika Base telah mencapai 13,97%.

"Sementara sesuai dengan konsep pengembangan dari NTB di atas, sudah sangat penting untuk daerah dan para pengrajin kerajinan harus pada saling membantu dalam mempromosikan cara untuk agar ekonomi NTB bisa berkembang lebih signifikan.

Berbagai produk dari pemerintah dan juga, sangat penting pariwisata di NTB, hingga mengubah pola pikir para dan memajukan para pebisnis dengan wisatawan, menjadi konsep yang harus diaplikasikan.

Tentu adanya perhatian dari berbagai stakeholder secara sinergis, pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan bisa lebih ke arah meningkatkan akan sulit diraihkan dalam waktu singkat. **ANI**

Data Industri Kerajinan NTB pada Periode 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016
USR USRA GURE	32.804	33.067	33.330	33.563	33.203
Tenaga Kerja (orang)	73.006	62.917	62.947	63.432	62.957
Investasi (Rp)	781.289.732.000	795.202.562.000	796.998.776.000	798.402.526.000	795.063.288.000
Produksi (Rp)	1.048.801.327.000	1.071.278.348.000	1.075.209.032.000	1.081.495.454.000	1.294.584.590.000



Ulasan Teropong yang kedua yakni berkaitan dengan artikel dari Bisnis Indonesia Halaman 10, Jumat 8 Juni 2018, yang berjudul “Inovasi dan Integritas Adalah Kunci”. Berikut ulasannya:

Dukungan Penuh Kementerian PUPR Untuk Pengembangan Mandalika/Lombok

Artikel ini mengupas mengenai potensi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni sektor pariwisata. Pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu pembangkit ekonomi Bumi Seribu Masjid tersebut. Pariwisata di daerah ini berusaha untuk melaju bersama kawasan-kawasan wisata lainnya di Indonesia.

Dalam artikel itu juga disebutkan bahwa akan lebih baik jika ada integrasi kawasan, sehingga selain menjual produk, wisatawan yang berkunjung juga bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda.

Terkait hal itu, Provinsi NTB yang berada di Pulau Lombok memiliki banyak potensi wisata. Salah satunya kawasan Mandalika. Kawasan tersebut merupakan salah satu dari tiga destinasi wisata yang difokuskan pemerintah untuk dikembangkan. Dua destinasi lainnya adalah Danau Toba (Sumatera Utara) dan Borobudur (Jawa Tengah). Ketiganya termasuk dalam program pemerintah yakni Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Seluruh instansi terkait pariwisata berupaya mewujudkan target 20 juta wisman, salah satunya Kementerian PUPR. Melalui perencanaan infrastruktur yang dibuat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR mendukung penuh

pengembangan wisata di tiga KSPN tersebut.

Sebagaimana diketahui, Pantai Mandalika merupakan salah satu di antara deretan pantai yang memanjang di Lombok Tengah bagian Selatan. Kementerian PUPR memiliki sejumlah program pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut.

Kementerian PUPR melalui BPIW saat ini tengah menyiapkan *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP) untuk KSPN Mandalika. Selain Mandalika, KSPN Borobudur dan Danau Toba juga mendapat dukungan dari Bank Dunia. Keterpaduan semua pihak dalam mendukung pengembangan pariwisata, terutama di tiga KSPN tersebut akan diramu dalam ITMP dalam mewujudkan pembangunan dengan basis perencanaan yang terpadu.

Bentuk dari keterpaduan misalnya ketika Kementerian Perhubungan membangun dermaga kapal, maka Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Daerah membangun pusat kerajinan dan atraksi budaya serta penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor pariwisata.

Sedangkan Kementerian PUPR membangun infrastruktur pendukung termasuk hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bermukim di sekitar lokasi Mandalika yang juga termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan permukiman nelayan. Program lain yang disiapkan seperti jalan akses, drainase, pembangunan Tempat Pembuangan (TPA) Sampah, dan air bersih utk masyarakat. **(Hendra Djamal)**

Prestasi Palembang EMAS 2018

Sejak 2013 Jadi Kota Paling Berkembang



Pembangunan Palembang terus mengalami perkembangan sejak beberapa tahun terakhir, itu terbukti dengan penilaian yang diberikan atas hasil kinerja tahun 2017, melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Nasional pada tanggal 30 April 2018.

Kota Palembang berhasil meraih penghargaan "terbaik nasional" dalam perencanaan pembangunan. Melalui penghargaan yang diserahkan Presiden Republik Indonesia (RI), H. Joko Widodo kepada Perihal Sumatera (PS) Walikota Palembang, Dr. H. Abdul Nuzli, SH, MHum.

Nuzli mengatakan, penghargaan ini diberikan Presiden RI kepada Kota Palembang, sebagai penghargaan khusus yang sebagai Kota dengan perencanaan terbaik tingkat Provinsi, karena telah meneken faktor.

Dicatatnya Palembang ini dinilai sebagai kota yang memiliki inovasi dalam pembangunan, strategi, potensi, dan pembangunan, cukup besar, sehingga pembangunan di Palembang terus meningkat mengahsilkan daerah-daerah lain di Indonesia dalam satu tahun terakhir. "Palembang menjadi daerah dengan pertumbuhan yang sangat baik bukan mengahsilkan daerah lain di Indonesia. Artinya, selama satu tahun ini Pemerintah Kota Palembang memberikan kerja terbaiknya," jelasnya.

Nuzli ditubuh dalam beberapa tahun terakhir Palembang unggul di beberapa faktor seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia yang tinggi di akan rata-rata.

"Pertumbuhan ekonomi Kota di atas rata-rata nasional, begitu juga dengan



Indeks pembangunan manusia yang di atas nasional dan provinsi Sumatera Selatan yaitu mencapai 76,09 persen. Artinya kepemimpinan Walikota di Kota Palembang sebelumnya sangat baik," ungkapnya.

Nuzli berharap, penghargaan yang di atas Palembang ini harus menjadi motivasi dan semangat semua jajaran untuk lebih bekerja keras mengahsilkan Palembang semakin baik.

"Meneruskan jejak OPD Kota Palembang, keberagaman, pembangunan yang baik juga diawasi dengan pelayanan yang baik, maka dari itu pelayanan kota harus baik, utamanya dalam pelayanan pemkot, karena orang akan banyak melakukan dan usaha di Palembang. Kalau pelayanan baik," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Baperbang) menandatangani, dia ini

Palembang menjadi Kota paling berkembang di Sumatera Selatan (Sumas), Selain itu, dia

data Badan Pusat Statistik (BPS), dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palembang dari tahun 2013 sampai 2017 terus mengalami kenaikan.

Pada 2013 IPM Kota Palembang sebesar 75,49% di tahun 2014 tercatat sebesar 76,02%. Kemudian pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan sebesar 76,29% di tahun 2016 IPM Palembang mencapai 76,59% dan tahun 2017 naik sebesar 0,63 poin menjadi 77,22%.

"Dimasa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Palembang yang baik itu Bapak H. Hamzah dan Bapak Nugroho, terus mengalami perkembangan. Hal itu juga ini terus dijadi dimasa kepemimpinan Pj Walikota, Abubakar Haplo selama enam bulan terakhir," ujarnya.

Dari sektor ekonomi, Pemerintah Kota Palembang berhasil meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang di atas rata-rata Sumal dan Nasional. Berdasarkan catatan BPS, pertumbuhan ekonomi Palembang pada tahun 2017 mencapai angka 5,7%.

Bahkan, Hamy Hedi menyampaikan, tahun 2018 Kota Palembang optimis pertumbuhan ekonomi Palembang bisa tumbuh di angka 6%.

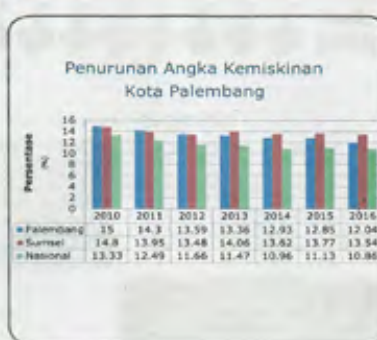
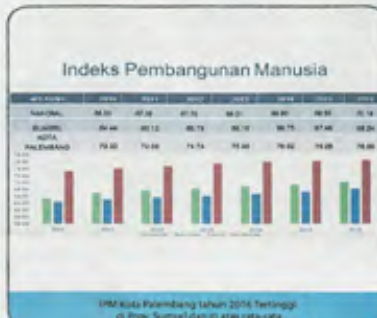
"Pada tahun 2017, sebelum ledakan saat, telah disiapkan beberapa beberapa langkah dalam bentuk program kerja untuk mencapai pertumbuhan ekonomi

5% selain bertumpu pada Aspek Gainers. Bahkan, Pj Walikota berkomitmen untuk memajukan apa yang diprogramkan untuk kesejahteraan masyarakat Palembang," ungkapnya.

Dari sisi lain, Pemerintah Kota Palembang juga dari tahun ke tahun berhasil merenkan angka kemiskinan. Menurut data BPS di tahun 2013 angka kemiskinan Kota Palembang tercatat sebesar 33,36% menurun sebesar 12,93% di tahun 2014. Pada tahun 2015 kembali menurun 12,85% dan pada tahun

2016 kembali merenkan angka kemiskinan menjadi 12,04%.

"Untuk bentuk komitmen Pemerintah dalam mewujudkan program Palembang EMAS (Eksklusif, Inovatif dan Supermas) 2018. Tidak hanya sektor infrastruktur, pembangunan SDM menjadi dasar pembangunan menjadi perhatian utama," tandasnya. (*)



Ulasan Teropong Media yang pertama di edisi kali terkait berita dari media Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Halaman 9. Rabu, 6 Juni 2018 yang diberi judul "Prestasi Palembang EMAS 2018, sejak 2013 Jadi Kota Paling Berkembang". Berikut ulasannya :

Pengembangan Metropolitan Palembang Raya

Dalam berita itu disebutkan bahwa pesatnya pembangunan di Kota Palembang beberapa tahun terakhir membawa kota tersebut mendapat penghargaan "Terbaik Nasional" dalam hal perencanaan pembangunan. Presiden RI, Joko Widodo memberikan penghargaan tersebut kepada Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Palembang Dr. H. Akhmad Najib pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Nasional pada tanggal 30 April 2018 lalu. Penghargaan itu merupakan hasil penilaian yang diberikan atas hasil kinerja tahun 2017.

Terkait pengembangan Kota Palembang dan kawasan sekitarnya, BPIW Kementerian PUPR telah menyusun *Masterplan* dan *Development Plan* Metropolitan Palembang Raya. tahun 2016. Metropolitan ini terdiri dari Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering. Peranan kabupaten (Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Banyuasin) di sekitar Kota Palembang yang berfungsi sebagai penyangga Kota Palembang.

Metropolitan Palembang Raya berada di Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 5 Jambi-Palembang-Pangkal Pinang-Tanjung Pandan dan WPS 6 Merak-Bakauhuni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api.

Luas kawasan Metropolitan Palembang Raya adalah 563,49 km². Luas wilayah perkotaan Palembang Raya paling kecil dibandingkan luas wilayah metropolitan lainnya.

Struktur Eksternal yang berpengaruh pada pengembangan kawasan Palembang Raya adalah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api dan Pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera.

Tema pengembangan kawasan Palembang Raya adalah mengembangkan dua kota inti dengan fungsi yang berbeda, yakni Tanjung Api-Api untuk pengembangan industri dan Kota Palembang sebagai pengembangan pusat perdagangan dan jasa.

Banyak program pembangunan infrastruktur PUPR yang diusulkan untuk dilaksanakan di Metropolitan Palembang Raya pada 2019, diantaranya adalah lanjutan pembangunan jalan akses jembatan Musi IV, pembangunan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung, dan Pembangunan *flyover* Sekip Ujung.

Selain itu juga diusulkan program Normalisasi Sungai Komering, Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku di KEK Tanjung Apiapi, dan Pembangunan Intake Air Baku Ogan II. **(Hendra Djamal)**



Sumber: Istimewa

BPIW Tajamkan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Strategis

Guna melakukan peningkatan keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan pengembangan kawasan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melalui Pusat Pengembangan Kawasan Strategis melakukan penajaman penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan strategis tahun anggaran (TA) 2018.

"Keterpaduan perencanaan dan pemrograman dalam pengembangan kawasan memang dinilai perlu terus ditingkatkan. Terlebih, saat ini Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang tak mudah dalam pengembangan infrastruktur," ungkap Kepala Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Wahyu Hendrastomo mewakili Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Hadi Sucahyono saat membuka "Rapat

Pembahasan Penyusunan *Quick Assessment* Pengembangan Infrastruktur PUPR Terpadu di Kawasan Strategis" di Jakarta, Senin (11/6).

Ia mengungkapkan, salah satu tantangan yang dihadapi yakni untuk tahun 2017-2018 Indeks Daya

Keterpaduan perencanaan dan pemrograman dalam pengembangan kawasan memang dinilai perlu terus ditingkatkan. Terlebih, saat ini Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang tak mudah dalam pengembangan infrastruktur

Saing Infrastruktur Indonesia masih menempati rangking 52. Kemudian, Indeks Daya Saing Global Indonesia tahun 2017-2018 menempati rangking 36.

Dengan begitu, lanjutnya, pemerintah telah menetapkan pembangunan

infrastruktur sebagai prioritas utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus mengejar ketertinggalan.

Wahyu juga mengatakan, Kementerian PUPR dalam melakukan pengembangan infrastruktur menerapkan pendekatan pola berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). "Dalam WPS tersebut terdapat sejumlah tema kawasan yang didukung Kementerian PUPR dalam pengembangan infrastrukturnya," terang Wahyu.

Ia menyebutkan, mulai dari 12 Kawasan Metropolitan, 13 Kota Baru, 20 Kawasan Industri dan 12 Kawasan Ekonomi Khusus, 10+2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, 40 Kawasan Perdesaan Strategis Nasional, 18 Provinsi Lumbung Pangan, Perbatasan Nasional serta termasuk konektivitas multimoda.

Wahyu berharap, kegiatan yang dihadiri



Kepala Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Wahyu Hendrastomo saat membuka kegiatan.

Sumber: Dok. BPIW

perwakilan berbagai kementerian tersebut dapat menyusun dokumen rencana aksi berdasarkan implementasi program-program tahun 2018 untuk infrastruktur Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, serta Penyediaan Perumahan termasuk kebutuhan yang berkembang agar selaras dengan pembangunan di kawasan strategis yang ditetapkan.

Dokumen rencana aksi yang disusun tersebut akan mendukung percepatan pembangunan kawasan strategis secara terpadu, baik antar infrastruktur PUPR maupun dengan infrastruktur non PUPR. "Dokumennya berupa Rencana Pengembangan Infrastruktur Terpadu dan Indikasi Program tahun 2019," terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis, Pusat Pengembangan

Kawasan Strategis, Brawijaya mengatakan, pada pembahasan tersebut kawasan yang diangkat secara khusus antara lain, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandeh, KSPN Muaro Jambi, KSPN Rawa Pening,

"Pembahasan tersebut dilaksanakan untuk menajamkan penyusunan rencana dan program pada lokasi kawasan-kawasan tersebut," jelas Brawijaya.

Kegiatan tersebut dihadiri juga perwakilan dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Badan Pengembangan Wilayah Suromadu. **(ris/infoBPIW)**

Dokumen rencana aksi yang disusun tersebut akan mendukung percepatan pembangunan kawasan strategis secara terpadu, baik antar infrastruktur PUPR maupun dengan infrastruktur non PUPR.

Kawasan Strategis Suromadu, Kawasan Industri Jorong-Batu Licin, Kawasan Industri Konawe, Kawasan Industri Buli dan Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) Pare-pare.

BPIW Susun Rencana Aksi Pengembangan Kawasan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung akselerasi pengembangan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Kelayang di Provinsi Bangka Belitung.

Salah satu tujuan dari dukungan infrastruktur PUPR yakni untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Hadi S u c a h y o n o m e n g a t a k a n , salah satu tujuan

dari dukungan infrastruktur PUPR yakni untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik.

“Pada tahun 2019, KSPN Tanjung Kelayang ditargetkan meraih kunjungan 500 ribu wisatawan mancanegara dan satu juta

wisatawan domestik,” ujar Hadi di Kantor BPIW, Jakarta, beberapa hari lalu.

Dalam rangka mendukung capaian sasaran 2019 tersebut dilakukan penanganan infrastruktur PUPR, yakni pengembangan pembangunan jalan, pengembangan infrastruktur permukiman, pengelolaan sumber daya air dan penyediaan perumahan.

“Untuk pembangunan jalan, pada tahun 2018 ini diantaranya ada program pemeliharaan rutin Tanjung Ru - Pilang - Perawas - Tanjung Pandan - Tanjung Tinggi, pemeliharaan rutin jembatan ruas Tanjung Ru - Pilang - Perawas - Tanjung Pandan - Tanjung Tinggi,” papar Hadi.

Selain itu, ada pemeliharaan preventif Jalan Perawas - Badau (*Slurry Seal*), pelebaran Jalan Sudirman (Tanjungpandan-Perawas, pemeliharaan rutin Jalan *Junction* (Simpang Lima Tanjung Pandan) - Tanjung Kelayang dan



Destinasi Pantai Tanjung Kelayang

Sumber: Dok. BPIW

program lainnya. Untuk pengembangan infrastruktur permukiman, lanjut Hadi, pada tahun 2018 ini sedang dilakukan peningkatan kualitas permukiman kumuh, penataan kawasan wisata Pantai Tanjung Kelayang serta optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Tanjung Batu.

“Termasuk pembangunan Kolam Konservasi Kolong Mempadin serta program lainnya,” terang Hadi.

Terkait pengelolaan sumber daya air, ungkap Hadi, dilakukan pembangunan prasarana penyediaan air baku Gunung Mentas, pembangunan Embung Konservasi Kolong Mempadin. “Termasuk pembangunan talud pengaman Pantai Samak Pegantungan dan lainnya,” ucapnya. Adapun untuk

penyediaan perumahan, Kementerian PUPR memiliki program peningkatan kualitas rumah swadaya. Program tersebut dilaksanakan melalui pendataan rumah tidak layak huni, dan pemberian bantuan stimulan rumah swadaya.

“Kemudian juga ada bantuan stimulan

Kementerian PUPR memiliki program peningkatan kualitas rumah swadaya. Program tersebut dilaksanakan melalui pendataan rumah tidak layak huni, dan pemberian bantuan stimulan rumah swadaya.

rumah khusus di kawasan Desa Wisata. Termasuk juga, pendataan kualitas *homestay* serta pemberian bantuan peningkatan kualitas *homestay*,” ujar Hadi.

la berharap, pemerintah daerah dan seluruh elemen terkait di KSPN Tanjung Kelayang, juga dapat memberikan dukungan demi terciptanya pariwisata yang berkembang baik di Tanjung Kelayang.

Dengan demikian dunia pariwisata di Tanjung Kelayang akan dapat memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. ([ris/mond/infoBPIW](#))

BPIW Siapkan Pedoman Tata Cara Penyusunan MPDP

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kawasan Strategis melakukan penyusunan Pedoman Tata Cara Penyusunan *Masterplan dan Development Plan* (MPDP) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Hadi Sucahyono mengatakan, BPIW selama tahun 2015-2016 telah menyusun MPDP 35 WPS.

"Dokumen MPDP yang telah tersusun tersebut, memiliki prosedur penyusunan yang beragam sesuai perkembangan waktu dan dinamika substansi di masing-masing WPS," papar Hadi saat menyampaikan arahan dalam Rapat Pembahasan Tata Cara

Penyusunan MPDP WPS di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, dari pengalaman penyusunan dokumen MPDP tersebut terdapat beberapa *input* analisis yang berkembang, sehingga hal tersebut baik untuk diterapkan pada seluruh proses penyusunan MPDP WPS.

Harapannya akan didapat kualitas yang baik seluruhnya untuk masing-masing MPDP WPS," papar Hadi.

Ia menambahkan, tata cara penyusunan ini juga dapat menjadi pedoman penajaman dalam proses *review* MPDP yang dilakukan setiap tahunnya.

Terlebih, lanjutnya, fungsi pembuatan MPDP WPS untuk menjawab masalah pengembangan wilayah secara konseptual dan pertanyaan teknis dari *decision maker*.

Dengan begitu, menurut Hadi, konten serta lokus dalam pembuatan MPDP bisa jadi sangat luas.

"Aspek yang diperhatikan tidak statis terkait infrastruktur, akan tetapi juga terkait pergerakan penduduk, ekonomi, lingkungan, sosial dan lainnya," papar Hadi.

Selain itu, aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah terkait



Hadi Sucahyono saat memberikan arahan

potensial investment, pembangunan ekonomi potensi daerah dan aspek keamanan.

"Misalnya lokasi pos polisi dan imigrasi untuk di kawasan pariwisata atau kawasan industri yang banyak didatangi warga negara asing," jelasnya.

Ia menilai, penyusunan MPDP juga perlu dikuatkan dengan pembuatan analisis mendalam, agar dapat menjadi justifikasi implementasi rencana program.

Tata cara penyusunan ini dapat menjadi pedoman penajaman dalam proses review MPDP yang dilakukan setiap tahunnya

"Hal itu akan menjadi masukan untuk Unit Organisasi (Unor) teknis atau pada saat Pra Konreg. Termasuk, untuk mengantisipasi kebijakan atau direktif baru yang muncul," paparnya.

Selain itu, Hadi menegaskan, MPDP juga perlu dilegalkan secara hukum. Sebab, pihak yang bergerak di lapangan bukan hanya pemerintah, namun juga ada pihak swasta bahkan spekulan. "Adanya legalisasi hukum akan membantu posisi pemerintah di mata hukum," terangnya.

Dalam Rapat Pembahasan Tata Cara

memiliki tugas dan fungsi terkait implementasi maupun pembiayaan.

"Pemerintah pusat memang harus dapat memberikan dukungan paling besar. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa visi yang ditetapkan harus selaras dengan kapasitas fiskal *eksisting*, sehingga dapat diimplementasikan," terangnya. Andi juga berharap, MPDP yang disusun BPIW dapat menjadi masukan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Lebih jauh Ia mengatakan, saat ini perlu

Di tempat sama, Sugiyantoro memaparkan, konsep WPS adalah konsep pengembangan wilayah walaupun disadari ada batasan legal formal. "Konsep awal WPS adalah inventarisasi program infrastruktur di kawasan-kawasan strategis yang sudah memiliki kedudukan legal formal," jelas

MPDP juga perlu dilegalkan secara hukum. Sebab, pihak yang bergerak di lapangan bukan hanya pemerintah, namun juga ada pihak swasta bahkan spekulan.

Sugiyantoro. Ia mengatakan, hal perlu diperhatikan dalam Pedoman tata cara adalah mengenai *problem statement* dan tujuan utama dari penyusunan MPDP WPS, sehingga bisa diturunkan kepada rencana infrastruktur.

Sebelum mengakhiri diskusi, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Antar Kawasan Strategis, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Wahyu Hendrastomo berharap, adanya *input* dari rapat kerja tersebut akan membuat *draft* Pedoman Tata Cara Penyusunan MPDP WPS semakin kaya.

Dengan demikian *draft* pedoman tersebut nantinya akan mengarahkan pada penyusunan MPDP yang makin berkualitas dan menjawab tantangan zaman. **(ris/infoBPIW)**



Sumber: Dok BPIW

Penyusunan MPDP WPS ini hadir narasumber dari para ahli yakni, Dr Hendricus Andy Simarmata S.T, M.Si dari Pusat Riset Perkotaan dan Wilayah Universitas Indonesia dan Ir. Sugiyantoro, MIP dari Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota Institut Teknologi Bandung.

Hendricus mengatakan, saat ini perlu ada penyalarsan antara muatan MPDP WPS dengan hasil produk rencana yang telah ada. Pasalnya, BPIW belum

ada evaluasi delineasi WPS agar sesuai dengan arahan RPJMN 2020-2024. Andi mengatakan, Bappenas sudah punya kajian terkait *dynamic modelling* penurunan emisi gas rumah kaca.

"Sehingga sebelum buat pedoman ada baiknya ada dahulu kesepakatan terkait WPS ini," terangnya. Ia juga berharap, BPIW harus berani menyampaikan kepada K/L lain terkait daerah mana yang seharusnya mendapat prioritas untuk didukung pengembangannya.

Kota Kecil di Perbatasan dan Kawasan Perdesaan Siap Dikembangkan

Untuk meningkatkan pemahaman *stakeholder* terhadap pengembangan kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Rapat Kajian Pengembangan Kota Kecil di Perbatasan dan Kawasan Perdesaan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga berharap kegiatan ini dapat memberi masukan dalam penyusunan *masterplan* yang sedang dilakukan.

Agusta menegaskan, Nawacita poin ke-3 mengamanatkan pembangunan nasional diutamakan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

"Ada juga arahan Presiden yang mendorong percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru disekitar PLBN," terangnya.

Dengan begitu, lanjutnya, kawasan perbatasan negara harus diperhatikan dan dibangun, sehingga menjadi

beranda terdepan dan etalase bangsa.

Pemerintah juga tidak berhenti pada pembangunan zona inti di PLBN, tetapi melanjutkan dengan zona pendukung dan memperlancar jalur konektivitas. Kemudian, disiapkan juga sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi, sehingga kawasan di sekitar PLBN dapat dikembangkan

Adapun pembagian penyusunannya diantaranya Kawasan Perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau dan Kawasan Perbatasan Motaain di Kabupaten Belu telah disusun oleh Bappenas tahun 2017. Kemudian, juga ada Kawasan Perbatasan Motamasin di Kabupaten Malaka, Kawasan Perbatasan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kawasan Perbatasan Skouw di Kota Jayapura yang sedang disusun oleh BPIW pada tahun ini.

Untuk Kawasan Perbatasan Aruk di Kabupaten Sambas dan Kawasan Perbatasan Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu juga sedang disusun oleh BNPP pada tahun yang sama.

Dalam Rapat Kajian Pengembangan Kota Kecil Perbatasan dan Kawasan Perdesaan ini hadir narasumber dari Bappenas yakni Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP, dan dari BNPP yakni Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Ir. Anny Julistiani, MBA, serta turut hadir narasumber dari lingkungan akademisi yaitu Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS dari Institut Pertanian Bogor.

Nawacita poin ke-3 mengamanatkan pembangunan nasional diutamakan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka Negara Kesatuan

sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Agusta menerangkan, penyusunan *masterplan* pembangunan kawasan ekonomi di PLBN ini disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian PUPR dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).



Rapat Kajian Pengembangan Kota Kecil Perbatasan dan Kawasan Perdesaan berlangsung dinamis.

Sumber: Dok BPIW

Suprayoga Hadi mengatakan, pengembangan kawasan perbatasan memiliki potensi investasi. “Daya tarik investasi daerah perbatasan terdiri dari lima aspek yaitu kelembagaan, sosial budaya, ekonomi daerah, produktivitas tenaga kerja, dan infrastruktur fisik”, ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kebutuhan pengembangan investasi kawasan perbatasan tahun 2020 adalah daya saing berbasis efisiensi yang didukung oleh SDM terampil dan terdidik, tersedianya infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi, serta tersedianya jaringan transportasi darat, laut dan udara.

“Sedangkan pada tahun 2025, pengembangan investasi kawasan perbatasan adalah dengan daya saing berbasis inovasi”, paparnya.

Ditempat yang sama, Anny Julistiani mengatakan dalam rangka percepatan pembangunan kawasan ekonomi

perbatasan melalui optimalisasi potensi kawasan, BNPP telah menyusun *Business Plan*. BPIW Kementerian PUPR dan Bappenas diharapkan menjadikan *business plan* tersebut sebagai masukan dalam penyusunan *masterplan*.

Kebutuhan pengembangan investasi kawasan perbatasan tahun 2020 adalah daya saing berbasis efisiensi yang didukung oleh SDM terampil dan terdidik.

Lala M. Kolopaking menambahkan, Indonesia akan memasuki masa Industri 4.0 yaitu industri sudah berbasis teknologi dengan kecerdasan buatan, sehingga pembangunan desa nantinya akan menghadapi era baru dengan perubahan cepat dan mengenal teknologi disrupti. Lebih lanjut ia mengatakan, terdapat tiga

evolusi konsep pembangunan kawasan perdesaan yaitu pembangunan berbasis masyarakat, penguatan inisiatif masyarakat yang didukung oleh pemerintah, dan kerjasama antar desa sebagai kawasan perdesaan.

Sebelum mengakhiri kegiatan, Agusta mengatakan, kegiatan ini dapat menambah pemahaman *stakeholder* terhadap pengembangan kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan dan nantinya *masterplan* yang akan disusun oleh beberapa Kementerian/Lembaga memiliki kesamaan standar dalam penyusunannya. **(shindie/infoBPIW)**

3 KSPN Dapat Dukungan Bank Dunia

Penyusunan ITMP Borobudur Mulai Dilaksanakan



Destinasi Candi Borobudur

Sumber: BPIW

Berbagai program dan strategi digulirkan Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk mengembangkan sektor pariwisata strategis di Tanah Air. Pemerintah juga telah menetapkan pengembangan tiga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan melibatkan dukungan Bank Dunia, yakni untuk pengembangan KSPN Borobudur di Jawa Tengah, Danau Toba di Sumatera Utara dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Secara total Pemerintah kini telah mematok target kunjungan 20 juta turis mancanegara di tahun 2019. Demi mencapai target kunjungan turis asing tersebut, Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah merancang pengembangan 10+2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Daerah wisata yang disebut sebagai 10+2 KSPN itu meliputi Danau Toba, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo - Tengger - Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, Morotai, Mandeh dan Toraja.

Dalam pengembangan KSPN yang melibatkan Bank Dunia ini, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara resmi telah memulai penyusunan *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP) KSPN Borobudur. Adapun untuk ITMP KSPN Danau Toba dan Mandalika akan menyusul setelah ada 'lampu hijau' dari Bank Dunia.

Pengembangan kawasan wisata yang mengacu pada ITMP tersebut, nantinya akan menggunakan anggaran dari Bank Dunia. Sebelumnya, Bank Dunia telah menandatangani surat komitmen akan memberikan pinjaman sebesar USD 300 juta kepada Pemerintah RI untuk pengembangan KSPN Danau Toba, Mandalika dan Borobudur.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan, peningkatan prasarana dan pelayanan dasar yang berhubungan dengan pariwisata

sangat penting untuk pengembangan kepariwisataan.

Terlebih pengembangan sektor pariwisata cenderung lebih cepat mendatangkan manfaat dibanding sektor lainnya. Sehingga sangat wajar bila sektor pariwisata mendapat perhatian dalam rangka membangun perekonomian negara.

"Dalam penyusunan ITMP untuk Kawasan Borobudur ini, diharapkan melahirkan dokumen rencana induk terintegrasi yang mewujudkan sektor pariwisata di kawasan

Borobudur dan sekitarnya benar-benar berkembang dengan baik," ungkap Lana saat membuka dan memberikan arahan pada "Kick off Meeting Penyusunan ITMP di Kawasan Borobudur" di Jakarta, Kamis (7/6) lalu.

Lana menyakini, pengembangan sektor pariwisata yang direncanakan dan dikelola dengan baik akan menciptakan banyak peluang lapangan kerja. Pasalnya, sektor pariwisata merupakan sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja,

seperti hotel, restoran, industri makanan dan minuman, kafe, transportasi dan lainnya.

Selain itu, sektor pariwisata pun merupakan sarana yang efektif untuk mendapat devisa bagi negara, yakni dari kunjungan wisatawan mancanegara.

Lana mengakui, Kementerian PUPR saat ini melakukan pengembangan infrastruktur dengan menerapkan pendekatan pola berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Dalam WPS tersebut

Pengembangan sektor pariwisata yang direncanakan dan dikelola dengan baik akan menciptakan banyak peluang lapangan kerja



Plt Kepala BPIW, Lana Winayanti saat menyampaikan arahan

Sumber: Dok BPIW

Laporan Khusus

terdapat sejumlah tema kawasan yang didukung Kementerian PUPR dalam pengembangan infrastrukturnya. "Salah satunya kawasan pariwisata atau yang lebih dikenal Kawasan Strategis Pariwisata Nasional," terang Lana.

Selama ini Kementerian PUPR telah memberikan banyak dukungan terhadap KSPN Borobudur dan sekitarnya. Seperti penyediaan infrastruktur jalan, sanitasi, air, pengelolaan limbah dan perumahan. Namun hal itu perlu terus ditingkatkan, sehingga pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia untuk dapat mengembangkan sektor pariwisata untuk pengembangan 3 KSPN.

Di tempat yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menerangkan, *Kick off Meeting* penyusunan ITMP Kawasan Borobudur tersebut merupakan kegiatan awal dalam rangka menyusun dokumen perencanaan ITMP KSPN Borobudur yang melibatkan konsultan kelas dunia.

"Saat ini Bank Dunia baru menyetujui Borobudur, untuk selanjutnya akan ada penyusunan ITMP kawasan wisata lainnya, seperti Danau Toba dan Mandalika," terangnya.

Hadi menerangkan, konsultan

internasional yang digandeng dalam penyusunan ITMP di Kawasan Borobudur ini merupakan konsultan yang telah berpengalaman di berbagai negara dalam membantu pengembangan kawasan pariwisata yang berhubungan dengan kawasan *heritage*, seperti pengembangan di Thailand, Nepal, Srilangka dan lainnya.

Penyusunan ITMP Kawasan Borobudur merupakan kegiatan awal dalam rangka menyusun dokumen perencanaan ITMP KSPN Borobudur yang melibatkan konsultan kelas dunia

Proses penyusunan ITMP KSPN Borobudur diperkirakan akan memakan waktu yang cukup panjang. "Akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan untuk pembahasan lebih rinci, guna mendapat ITMP yang betul-betul ideal," terang Hadi.

Di sisi lain, Hadi juga menerangkan, dukungan dari Anggaran Pendapatan Perbelanjaan Negara (APBN) untuk infrastruktur di KSPN Borobudur masih tetap berjalan. Tepatnya, dalam penanganan infrastruktur PUPR, yakni pengembangan konektivitas, pengembangan infrastruktur

permukiman, pengelolaan sumber daya air dan penyediaan perumahan.

"Untuk penanganan konektivitas, diantaranya ada rehabilitasi Jalan Tanjung Japuan-Mendut, preservasi pelebaran jalan menuju Standar Pringsurat-Secang-Bts.Yogya, termasuk pemeliharaan rutin Jalan Keprekan-Borobudur," ujar Hadi.

Selain itu, ada pembangunan Jalan Baru Kretek-Girijati, pembangunan Jembatan Gantung Nawacita, pembangunan Jembatan Kretek 2, pelebaran Jalan Sindutan-Cogot dan Jalan Demen-Glagah.

"Ada juga pelebaran Jalan Sentolo-Dekso, rehabilitasi Jalan Tanjung Japuan-Mendut, pembangunan *Underpass* Kentungan dan banyak lagi program lainnya," ucap Hadi.

Terkait pengembangan infrastruktur permukiman, ada penataan Kawasan Wisata Candi Mendut, penataan Kawasan Candi Pawon, pembangunan Kawasan Borobudur serta pembangunan drainase mendukung KSPN Borobudur.

Selain itu, ada program peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan Kawasan Bantul, optimalisasi Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Dlingo, peningkatan infrastruktur air limbah terpusat Sewon, pengembangan permukiman



Forum diskusi saat *Kick off Meeting* penyusunan ITMP Kawasan Borobudur

Sumber: Kemen PUPR

perdesaan, optimalisasi SPAM di Kawasan Sermo.

“Ada juga optimalisasi SPAM di Kawasan Kalibawang, pengembangan SPAM Panjatan, peningkatan kinerja TPA (Tempat Pembuangan Akhir Sampah, red) Banyuroto dan banyak program lainnya,” ungkap Hadi.

Untuk pengelolaan sumber daya air, Hadi mengatakan, ada pembangunan jaringan air baku Kawasan Perekonomian Terpadu (KAPET) Kabupaten Kulon Progo, penyediaan air baku KSPN Borobudur, pembangunan perkuatan Tebing Sungai Gajah Wong, pembangunan perkuatan Tebing Sungai Winongo Kecil, pembangunan Bendung Kamijoro.

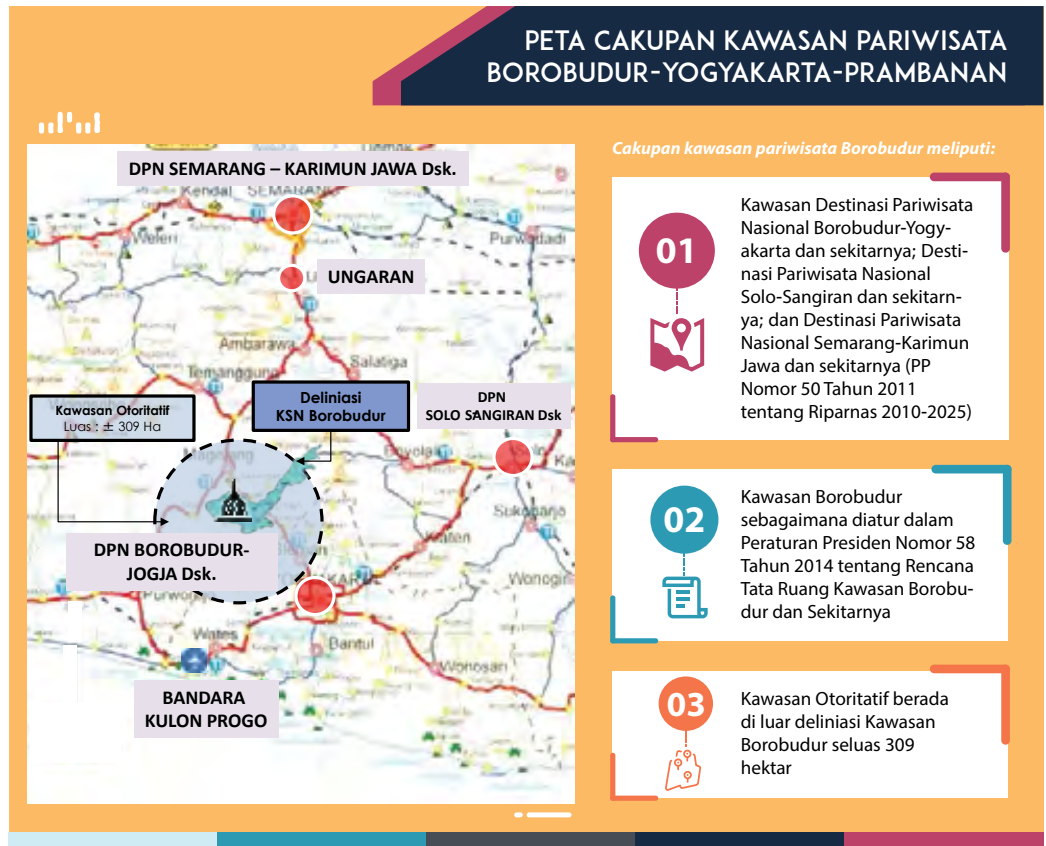
“Termasuk ada rehabilitasi jaringan irigasi Tuk Kuning, pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Progo dan program lainnya,” kata Hadi.

Untuk penyediaan perumahan ada pembangunan rumah susun Pondok Pesantren ICBB, pembangunan rumah khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kabupaten Magelang serta pembangunan Rumah Susun Sewa.

Kemudian ada juga peningkatan kualitas rumah swadaya, pembangunan rumah susun asrama mahasiswa Syantikara dan lainnya.

Ia berharap, sejumlah pemerintah daerah di sekitar kawasan KSPN Borobudur dapat bersinergi dengan pemerintah pusat, sehingga pemerintah di daerah dapat menyiapkan diri dan melakukan langkah-langkah untuk bersinergi demi terciptanya percepatan dalam pengembangan KSPN tersebut.

Senior Private Sector Specialist Trade and Competitiveness, Bank Dunia,



Bertine Kamphuis mengatakan, pihaknya berharap dalam ITMP ada rencana pengembangan transportasi antarmoda di lokasi destinasi pariwisata yang terintegrasi dengan jaringan transportasi di wilayah sekitarnya.

Program pengembangan infrastruktur perlu mempertimbangkan kearifan lokal dan meminimalisir dampak lingkungan, termasuk pemanfaatan energi alternatif pada kawasan pariwisata Borobudur perlu bersinergi dengan pemerintah pusat

Bertine menambahkan, program pengembangan infrastruktur perlu mempertimbangkan kearifan lokal dan meminimalisir dampak lingkungan, termasuk pemanfaatan energi alternatif pada kawasan pariwisata. “Termasuk,

pengembangan kapasitas komunitas dan budaya lokal pada destinasi wisata,” jelas Bertine.

Kegiatan *Kick off Meeting* penyusunan ITMP di Kawasan Borobudur ini dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim, Kementerian Pariwisata, Badan Otorita Borobudur, Tim Konsultan, Bank Dunia dan perwakilan Pemerintah daerah di sekitar destinasi Borobudur. (ris/infoBPIW)

Masterplan, Development Plan dan Studi Penetapan Kawasan Metropolitan Banjarkakula di WPS 22 Palangkaraya - Banjarmasin - Batulicin

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan globalisasi, pertumbuhan kota-kota di Indonesia mengalami peningkatan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam RPJPN Tahun 2005-2025 diamanatkan salah satunya adalah upaya peningkatan ketersediaan Infrastruktur Dasar.

Berdasarkan amanat Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 salah satu sasaran utama pembangunan perkotaan tahun

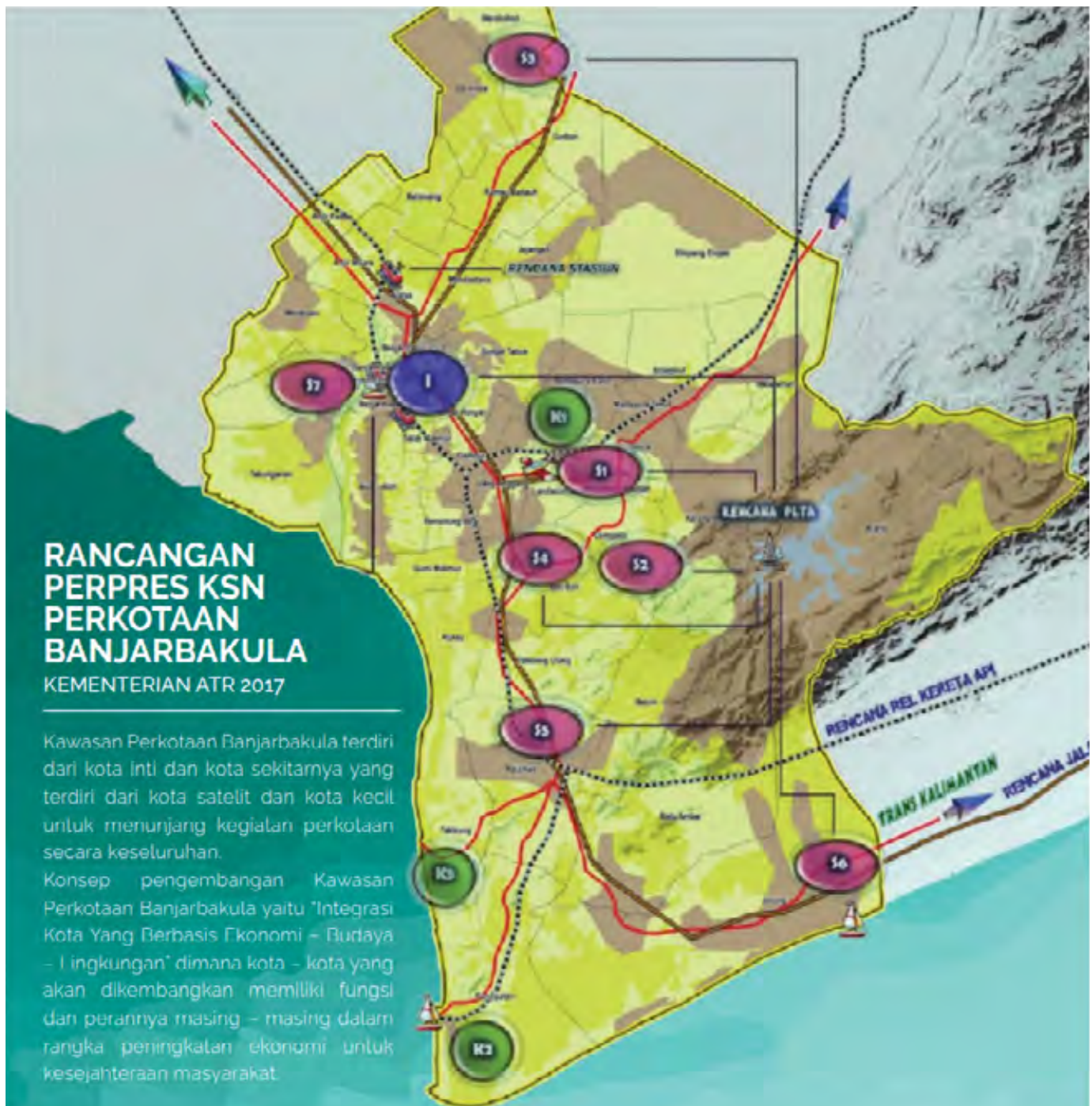
2015-2019 yaitu: Pembangunan Lima Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa-Bali sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan menjadi pusat investasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya guna mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa.

Salah satu target dari RPJMN itu sendiri adalah Pengembangan Metropolitan Baru Banjarkakula yang didalamnya terdapat Kota Banjarmasin sebagai

Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Hingga saat ini sudah ada tujuh kawasan metropolitan sebagai Kawasan Strategis Nasional Perkotaan (KSN Perkotaan) di Indonesia yang telah ditetapkan PP nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN.

Kota Banjarmasin sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Banjarmasin dan Sekitarnya (Banjarkakula) merupakan salah satu pusat pertumbuhan dalam WPS Pusat Pertumbuhan Baru. Kawasan Perkotaan Banjarmasin dan Sekitarnya





**RANCANGAN
PERPRES KSN
PERKOTAAN
BANJARBAKULA**
KEMENTERIAN ATR 2017

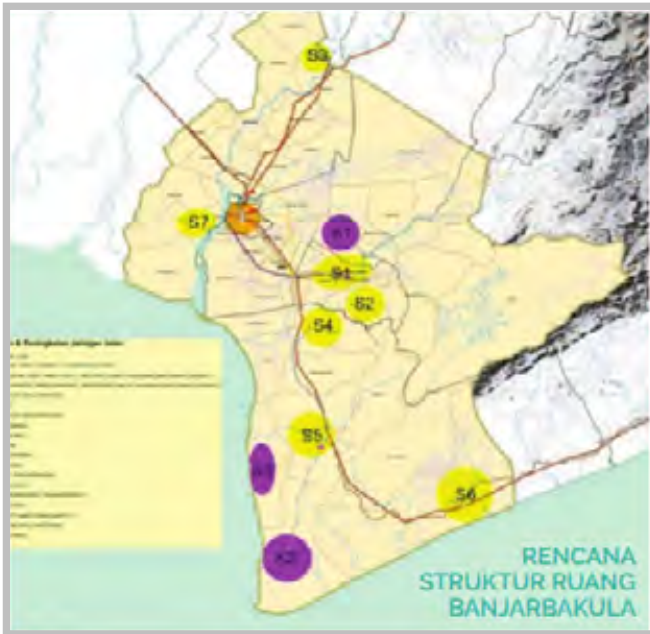
Kawasan Perkotaan Banjarbakula terdiri dari kota inti dan kota sekitarnya yang terdiri dari kota satelit dan kota kecil untuk menunjang kegiatan perkotaan secara keseluruhan. Konsep pengembangan Kawasan Perkotaan Banjarbakula yaitu "Integrasi Kota Yang Berbasis Ekonomi - Budaya - Lingkungan" dimana kota - kota yang akan dikembangkan memiliki fungsi dan perannya masing - masing dalam rangka peningkatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1. Rancangan Perpres KSN Perkotaan Banjarbakula

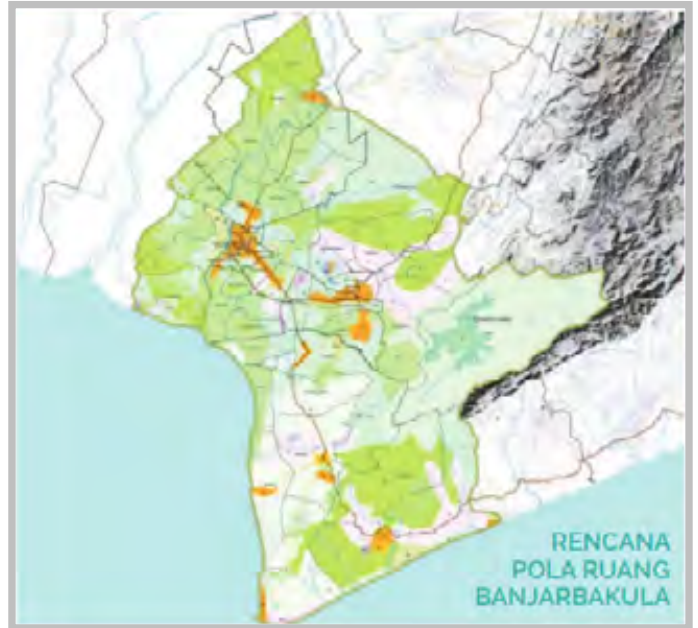
(Banjarbakula) berpotensi untuk dikembangkan menjadi salah satu *centre of excellence* di Koridor Ekonomi Kalimantan. Kota Banjarmasin memiliki jumlah penduduk mencapai 656.778 jiwa (Tahun 2013) dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan mencapai 6,41 persen pada 6 tahun terakhir, Kota Banjarmasin menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan

yang sangat cepat. Kota Banjarmasin tumbuh menjadi pusat perkembangan berbagai sektor, terutama pada sektor industri pengolahan dan jasa transportasi. Kawasan ini didominasi aktivitas ekonomi ada pada sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran, meskipun sektor pertanian masih menjadi basis sektor di wilayah ini.

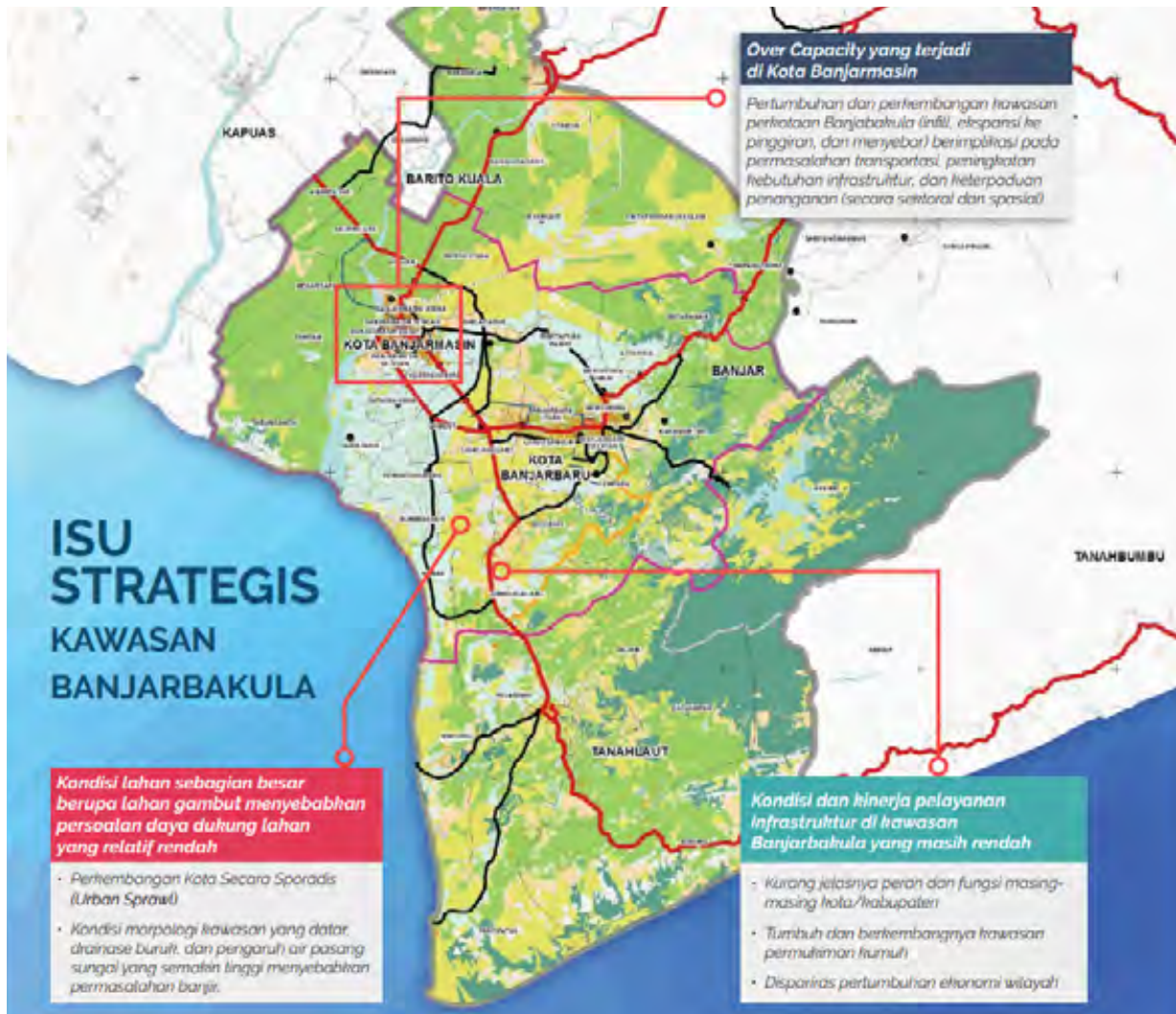
Infrastruktur primer yang mendukung pengembangan Kawasan Banjarbakula antara lain Pelabuhan Trisakti yang berstatus sebagai Pelabuhan Nasional, Bandara Syamsudin Noor (Banjarmasin), dan Rencana Jalan Tol Banjarmasin-Liang Anggang-Landasan Ulin.



Gambar 2. Rencana Struktur Ruang banjarkakula



Gambar 3. Rencana Pola Ruang Banjarkakula



Gambar 4. Isu Strategis Kawasan Banjarkakula

Positioning Kawasan Metropolitan Banjarbakula

Kawasan metropolitan Banjarbakula di provinsi Kalimantan Selatan merupakan kawasan perkotaan yang perkembangannya didorong dengan berbagai kebijakan guna menunjang

perekonomian masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan melihat indikasi perkembangan kawasan perkotaan yang memiliki dua kutub pertumbuhan, di mana satu dan lainnya saling mendukung dalam lingkup yang lebih luas. Perkembangan Banjarbakula ditopang oleh sistem konektivitas

yang memadai baik jalur perhubungan darat, laut maupun udara. Ini mencerminkan kawasan Banjarbakula memiliki keterkaitan yang sangat kuat dalam lingkup regional dan global. (Alis/Farhan/Fitri)

- Struktur Eksternal yang berpengaruh pada pengembangan kawasan Banjarbakula adalah :
- Pengembangan Kawasan perkotaan Balikpapan – Samarinda dan PKN Palangkaraya
- Pengembangan Jalan Tol Kuala Kapuas – Banjarmasin – Balikpapan – Samarinda – Sangatta
- Pengembangan Jalur Kereta Api Trans Kalimantan
- Pengembangan KEK Batulicin



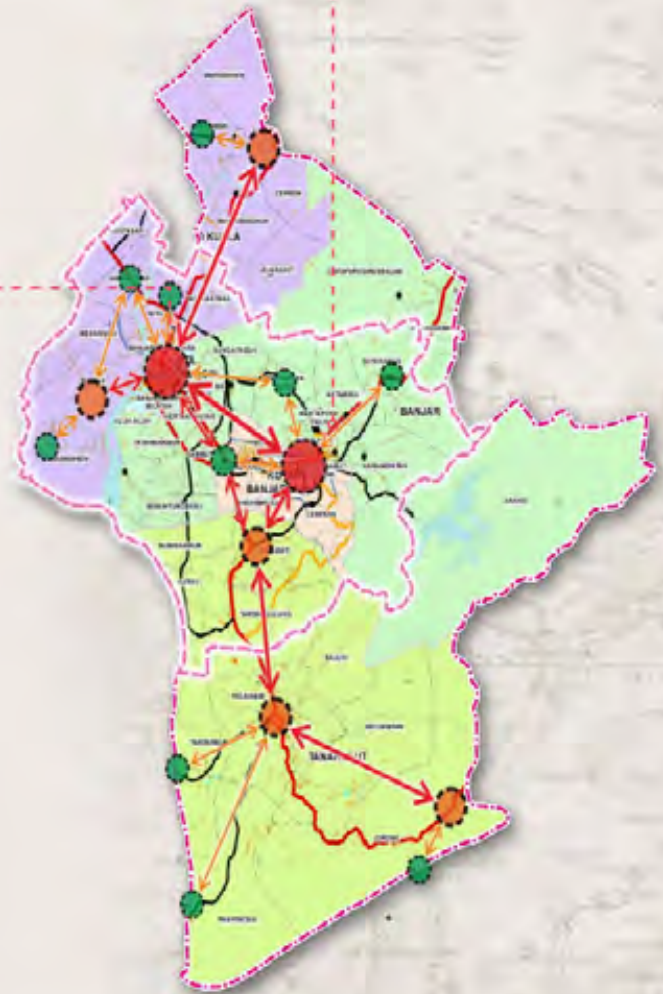
METROPOLITAN BANJARBAKULA BERADA DI WPS 22 PALANGKARAYA- BANJARMASIN – BATULICIN

TEMA PENGEMBANGAN

**"Metropolitan Banjarbakula
Sebagai Pusat Perekonomian
Kalimantan Yang Lestari,
Prospektif Dan Berdaya Salang"**

TUJUAN & SASARAN

**"Mewujudkan
Metropolitan Banjarbakula
Sebagai Pusat Kegiatan Ekonomi
Yang Berbasis Pada Industri,
Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata"**



Sasaran :

- Pengembangan pusat kegiatan yang didukung oleh jaringan infrastruktur terpadu
- Pengembangan sistem transportasi darat dan sungai yang terintegrasi
 - Pengembangan Pelabuhan Trisakti dan Pelabuhan Jarong sebagai pelabuhan utama
- Mendorong perlambahan Industri Barita Muara, Mantul, Liang Anggang, Bati-Bati dan mendorong industri baru di Banjarmasin Selatan
- Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa
 - Pengembangan pariwisata berbasis sungai





KOTA BANJARMASIN

- STATUS PKN
- PUSAT KEGIATAN EKONOMI WILAYAH KALIMANTAN BAGIAN SELATAN
- FUNGSI PERDAGANGAN, JASA, PERKANTORAN
- PUSAT KOLEKSI DAN DISTRIBUSI BARANG HASIL PRODUKSI WILAYAH
- PUSAT PELAYANAN DAN PENDEMBANGAN PARIWISATA

PERKOTAAN BANJARBARU - MARTAPURA

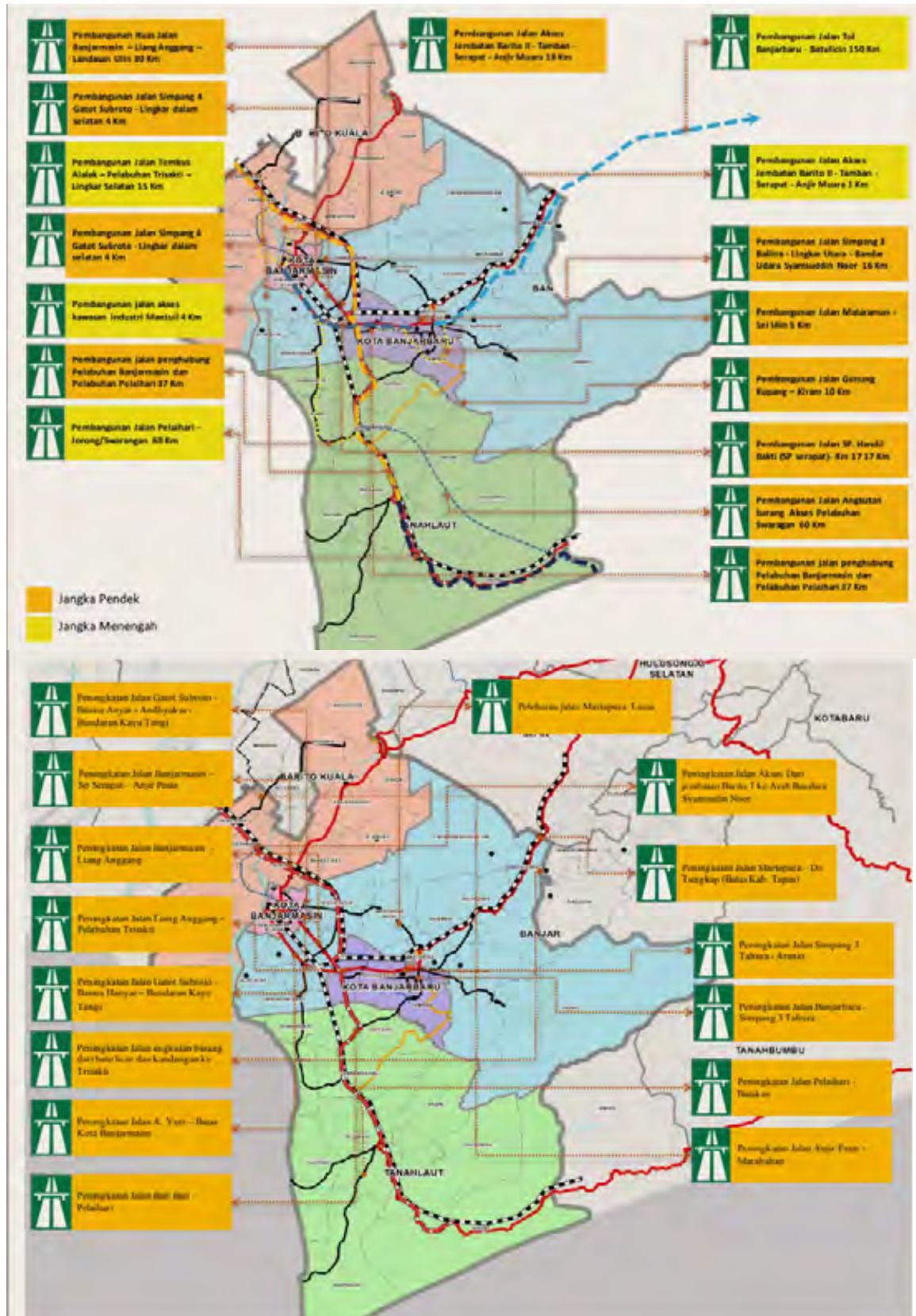
- STATUS PKW
- PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI
- PUSAT PENDIDIKAN
- PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
- FUNGSI PELAYANAN

Sistem linthage antar wilayah dikembangkan dengan membangun akses transportasi regional darat, laut dan udara, yaitu:

- Pelabuhan Trisakti sebagai Pelabuhan Utama (Penumpang dan Barang)
- Pelabuhan Pelaihari sebagai pelabuhan pengumpul (untuk Penumpang, Nelayan dan Wisata)
- Pelabuhan Swarangan sebagai pelabuhan pengumpul (untuk transportasi barang hasil produksi wilayah)
- Bandara Internasional Syamsudin Noor
- Terminal Anghutan Darat
- Jaringan Kereta Api (Penumpang dan Barang)



DEVELOPMENT PLAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA TAHUN 2019-2023



**Judul Buku :**

Kota Berketahanan: Inovasi Perkotaan Berwatak Indonesia dari Konsep ke Kebijakan hingga Implementasi

Penyusun :

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan bekerjasama dengan *International Institute for Urban Resilience and Infrastructure* (i3URI)

Penerbit :

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Tahun Terbit : 2016**Jumlah Halaman:** 93 halaman**ISBN:** 978-602-74438-0-8

Antisipasi Resiko dengan Konsep Pembangunan Kota Berketahanan

Kota berketahanan (*resilient city*) adalah kota dimana pemerintah setempat dan penduduknya paham terhadap resiko dan ketidakpastian yang membayangkannya di masa depan. Pemahaman tersebut ditandai dengan adanya pemerintahan setempat yang inklusif, kompeten, akuntabel, peduli terhadap urbanisasi yang berkelanjutan serta mengambil langkah-langkah antisipatif dan mitigatif terhadap dampak dari bencana perubahan iklim. Karenanya, Kota Berketahanan perlu memiliki strategi dan mampu merespon dan menerapkan tindakan pemulihan cepat untuk mengembalikan layanan-layanan dasar untuk membangun kembali kegiatan sosial, institusional, dan ekonomi pasca bencana.

Pada gilirannya, bencana yang terjadi makin berkurang, karena penduduknya bermukim di hunian dan kawasan yang memiliki layanan dan infrastruktur yang terorganisasi yang menyertakan kode bangunan yang memadai. Selain itu, Kota Berketahanan juga menjaga agar permukiman informal tidak dibangun di paparan banjir atau lereng curam akibat lahan yang tidak tersedia.

Pengembangan Kota Berketahanan sangat beralasan karena kota sebagai konsentrasi penduduk, infrastruktur, aset dan lingkungan terbangun memiliki resiko kumulatif yang tinggi atas berbagai ancaman bencana dan perubahan iklim. Di Indonesia sendiri, konsep Kota Berketahanan telah menjadi salah satu pilar pembangunan di dalam Dokumen RPJMN (2015-2019). Tujuan pembangunan kota yang berketahanan ini adalah menciptakan kota-kota yang inklusif, nyaman (*liveable*), hijau (*green*), cerdas (*smart*), dan berdaya saing (*competitive*).

Buku ini disusun dalam 6 bagian. Bagian pertama membahas mengenai resiko-resiko yang mengancam kota-kota di Indonesia. Bagian kedua membahas hubungan 2 variabel antara resiko dan Kota Berketahanan. Bagian ketiga mulai memaparkan bagaimana membangun Kota Berketahanan. Bagian keempat menjelaskan hal lebih praktis, yaitu Bagaimana Melaksanakan Kota berketahanan dalam aksi nyata. Bagian kelima, membahas mengenai narasi kota berketahanan di Indonesia dalam bingkai arahan dan kebijakan. Sedangkan bagian terakhir adalah penutup. **(Mutri)**

Di Indonesia, konsep Kota Berketahanan telah menjadi salah satu pilar pembangunan di dalam Dokumen RPJMN (2015-2019). Tujuan pembangunan kota yang berketahanan ini adalah menciptakan kota-kota yang inklusif, nyaman (*liveable*), hijau (*green*), cerdas (*smart*), dan berdaya saing (*competitive*).

Perlunya Perencanaan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan



Alfa A. Ash Shiddiqi

*Kasubag Sinkronisasi Program dan Pembiayaan I
Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR
BPIW Kementerian PUPR*

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma penting dalam kebijakan publik. Konsep berkelanjutan secara tegas berusaha memperhitungkan konsekuensi masa mendatang dalam perilaku pembangunan saat ini. Infrastruktur merupakan tulang punggung dari pertumbuhan ekonomi, namun pembangunannya juga berdampak langsung pada perkembangan penduduk, hubungan sosial, dan lingkungan hidup karenanya merupakan hal dasar bagi pemerintah dan masyarakat (OECD, 2015).

Pembangunan infrastruktur pasca krisis ekonomi 1998, memperlihatkan kenaikan anggaran dari 37 triliun di Tahun 2010, hingga 110 triliun pada tahun 2018 ini. Angka tersebut merupakan angka yang besar. Seluruh pembangunan infrastruktur diawali oleh proses perencanaan dan pemrograman, sehingga tahapan ini merupakan tahapan yang vital secara jangka panjang, bahkan lebih vital bila dibandingkan dengan tahapan konstruksi.

**tulisan ini hanya opini pribadi penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi institusi*



Ilustrasi pembangunan berkelanjutan

Sumber: : Istimewa

Perencanaan dan pemrograman infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengacu pada Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang itu menyebutkan bahwa "Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan ...". Meski begitu dalam perangkat hukum tersebut, keberlanjutan yang dimaksud belum diatur secara tersurat.

Pembangunan infrastruktur dengan nilai yang begitu besar, membutuhkan sumber daya yang besar pula. Hal itu juga mempengaruhi lingkungan sosial maupun ekonomi, selain juga dapat berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kelestarian alam, dan keberlanjutan pembangunan.

Gejala-gejala ketidakberlanjutan dapat terlihat dari hal-hal berikut: pemanasan global, perubahan iklim, kerusakan ozon, polusi udara, peningkatan asam pada atmosfer, kepunahan spesies, penggundulan hutan, habisnya sumber daya alam, kerusakan sumber air, maupun sampah yang tidak tertangani.

Berbagai diskusi telah dilakukan untuk mempelajari pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan pemahaman yang berbeda, namun sebagian besar sepakat bahwa infrastruktur memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Keniscayaan akan pembangunan yang berkelanjutan, menuntut agar perencanaan dan pemrograman infrastruktur berbenah dan mengadopsi isu keberlanjutan pembangunan. Isu keberlanjutan pembangunan baik dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan haruslah sudah mulai menjadi kriteria pada tahap sebelum konstruksi dalam hal ini pada tahap perencanaan pemrograman.

Perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur haruslah memperhatikan dampak negatif pembangunan terhadap keberlanjutan dalam ranah ekonomi dan dalam hal apakah anggaran tersebut berkelanjutan?. Kemudian, dilihat dari sisi

mengenai eifisienkah perencanaan anggaran (manfaat dibanding biayanya)?. Pada ranah sosial, perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan dampaknya terhadap keberlanjutan pasar tenaga kerja maupun partisipasi masyarakat.

Pembangunan yang berkelanjutan secara lingkungan juga sudah harus dimulai dari tahap perencanaan pemrograman, alih-alih baru diperhatikan pada tahap konstruksi ataupun pada tahap pengadaan pekerjaan konstruksi infrastruktur tersebut. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang meliputi prinsip saling ketergantungan, prinsip



keseimbangan, dan prinsip keadilan harus diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan untuk mencapai kondisi keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup manusia.

Salah satu sasaran strategis Kementerian PUPR dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019 adalah SS-5 “Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran dalam pembangunan infrastruktur”. Hal tersebut memperlihatkan bahwa proses perencanaan pemrograman sudah memperhatikan faktor keterpaduan baik antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan. Meski begitu, faktor keberlanjutan pembangunan belum secara tercantum dan diselenggarakan.

Perangkat-perangkat dalam sistem perencanaan pemrograman pembangunan infrastruktur seperti indikator dan kriteria belum tersusun secara jelas dalam rangka memastikan hasil dari perencanaan pemrograman merupakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Indikator berfungsi untuk mengukur dan menyederhanakan suatu fenomena agar lebih mudah dipahami posisi atau keadaannya. Sedangkan kriteria merupakan suatu acuan atau standar untuk menilai atau memvonis suatu keadaan. Indikator dan kriteria

merupakan perangkat yang penting untuk mengembangkan keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR mengacu pada UU SPPN dan kaidah-kaidah pengembangan wilayah dan penataan ruang.

Faktor keberlanjutan belum menjadi konsideran yang vital dalam memastikan pembangunan infrastruktur (sebagai hasil proses perencanaan pemrograman) merupakan

Secara langsung, infrastruktur memberikan manfaat terhadap kegiatan ekonomi melalui ketersediaan fasilitas produksi dan distribusi dari infrastruktur itu sendiri. Jalan, sebagai contoh, menjadi faktor pendukung utama pergerakan tenaga kerja dari domisilinya menuju pusat-pusat kegiatan produksi.

pembangunan yang berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Karena belum diatur secara gamblang, maka pembangunan yang berkelanjutan belum dapat dipastikan, dan pada pelaksanaannya bergantung pada aktor pelaku perencanaan pemrograman dan faktor pendukung lainnya. Bahkan terkadang faktor politik seperti contohnya Perpres No. 3/2016

tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat menegaskan kaidah yang biasa dilaksanakan pada proses perencanaan pemrograman.

Dari gambaran umum tersebut, indikator dan kriteria yang memastikan bahwa proses perencanaan pemrograman pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR dapat menghasilkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan merupakan hal yang perlu mulai dikaji.

Teori Pembangunan Berkelanjutan

Teori tiga pilar pembangunan berkelanjutan seperti yang diperkenalkan Elkington (1997) yang disebut Three Bottom Line atau 3P (People, Profit, Planet) mulanya diperkenalkan untuk mengubah paradigma pelaku ekonomi yang hanya mengejar keuntungan (profit) belaka untuk juga memperhatikan aspek manusia dan lingkungan sebagai nilai yang dianut pengambilan keputusan.

Laporan Brundtland (1987) berjudul *Our Common Future* dalam *World Commission on Environment and Development/WECD* juga menjelaskan tiga aspek yang sama, yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam mendukung keberlanjutan. Kemudian, teori tersebut berkembang menjadi tiga lingkaran (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang beririsan dimana irisan ketiganya adalah keberlanjutan. Teori ini menjelaskan bahwa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, tiga aspek

utama harus sama-sama dipenuhi dan diperhatikan dalam implementasi suatu pembangunan.

Model tiga lingkaran beririsan tersebut selanjutnya berkembang menjadi model himpunan bagian, seperti dijelaskan oleh Rockstrom dan Sukhdev (2016) dalam *The Global Goals for Sustainable Development*.

Sasaran Pembangunan Berkelanjutan mempromosikan 17 agenda pembangunan berkelanjutan yang dimodelkan dalam tiga aspek dalam tiga lingkaran yang menjadi himpunan bagian dimana ekonomi merupakan subsistem dari sosial/masyarakat dan masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dari lingkungan alam. Persepsi ini menyiratkan bahwa keberlanjutan ekonomi tidak dapat tercapai tanpa keberlanjutan sosial dan tidak bisa terbangun masyarakat yang berkelanjutan tanpa didukung oleh lingkungan alam yang berkelanjutan.

Aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam himpunan bagian (model nested SDG)





VISIUM KEMENTERIAN PUPR 2030



**2017-
2019**

Kapasitas Tampung
57,75 m³/c/th
Anggaran Rp.306 T

Jalan Mantap 94%
Jalan Tol 824 Km
Jalan Baru 1.320 Km
Jembatan Baru/FO 39.000 M
Anggaran Rp.183 T
Investasi Rp.202 T

78% Air Minum
27.000 ha Kumuh
75% Sanitasi
Anggaran Rp.45 T

**2020-
2024**

Kapasitas Tampung
68,11 m³/c/th
Anggaran Rp.577 T

Jalan Mantap 97%
Jalan Tol 1.500 Km
Jalan Baru 2.500 Km
Jembatan Baru/FO 60.000 M
Anggaran Rp.330 T
Investasi Rp.243 T

88% Air Minum
17.000 ha Kumuh
85% Sanitasi
Anggaran Rp.128 T

**2025-
2030**

Kapasitas Tampung
120 m³/c/th
Anggaran Rp.1.423 T

Jalan Mantap 99%
Jalan Tol 2.000 Km
Jalan Baru 3.000 Km
Jembatan Baru/FO 70.000 M
Anggaran Rp.448 T
Investasi Rp.390 T

100% Air Minum
0 ha Kumuh
100% Sanitasi
Anggaran Rp.170 T

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No.26/PRT/M/2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian PUPR

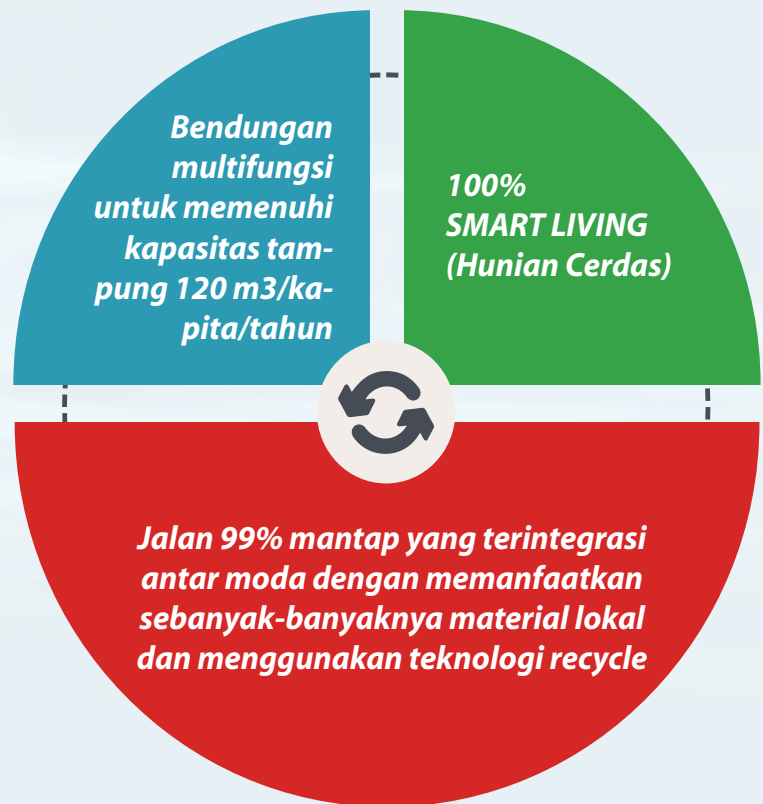


Visi dan Misi Umum (Visium) Kementerian PUPR 2030 menuju target 100 persen hunian cerdas dan juga bendungan multifungsi. Visium 2030 juga menuju pencapaian 99 persen kondisi infrastruktur jalan mantap, yang terintegrasi antar moda. Saat ini Kementerian PUPR masih berupaya memenuhi beberapa target untuk tahun 2017 hingga 2019, seperti pembangunan jalan mantap 94 persen dan 5,4 juta *backlog* untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

5,4 jt Backlog MBR
Pembangunan 2,76 juta unit
Anggaran Rp.414 T
10% APBN/APBD
90% Masyarakat

5 jt Backlog MBR
Pembangunan 3,9 juta unit
Anggaran Rp.780 T
20%-30% APBN/APBD
70%-80% Swasta/Masyarakat

3 jt Backlog MBR
Pembangunan 4,88 juta unit
Anggaran Rp.1.220 T
20%-30% APBN/APBD
70%-80% Swasta/Masyarakat





Wisata Sekaligus Belajar Sejarah dan Budaya di Museum Nasional Indonesia

Foto: Disa

Salah satu tempat yang layak dikunjungi untuk mengisi akhir pekan minggu ini adalah Museum Nasional Indonesia (MNI). MNI berlokasi di Jl. Medan Merdeka Barat No.12, Kota Jakarta Pusat. Akses menuju ke sana pun tidak sulit, mengingat lokasinya yang berada di pusat kota.

Harga tiket masuknya pun sangat terjangkau, Rp 5 ribu untuk dewasa dan Rp 3 ribu untuk anak-anak. Museum ini lebih dikenal dengan nama Museum Gajah karena terdapat patung gajah yang terbuat dari perunggu tepat di depan museum. Patung gajah tersebut merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn (Thailand) pada tahun 1871.

MNI dibangun di atas tanah seluas 26.500 meter persegi dan saat ini terdiri atas dua unit gedung, yaitu Gedung

Gajah (Unit A) dan Gedung Arca (Unit B) yang merupakan bangunan baru. Koleksi Museum Nasional Indonesia berjumlah lebih dari 140 ribu yang tersimpan di Gedung Gajah dan

Museum ini lebih dikenal dengan nama Museum Gajah, karena terdapat patung gajah yang terbuat dari perunggu tepat di depan museum. Patung gajah tersebut merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn (Thailand) pada tahun 1871.

Gedung Arca. Gedung Museum Nasional sempat ditutup sementara, karena masih dalam tahap renovasi yang rencananya akan dibuka pada tanggal 18 Agustus 2018 mendatang, bersamaan dengan dibukanya pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara,

Asian Games 2018. Gedung Arca yang terdiri atas 4 lantai ini menyimpan banyak koleksi tematik. Selain digunakan untuk pameran, Gedung Arca juga digunakan untuk kantor, ruang konferensi, laboratorium, dan perpustakaan.

Lantai 1: Manusia dan Lingkungan

Di Lantai 1 Gedung Arca Ini bertemakan Manusia dan Lingkungan yang menyimpan artefak-artefak manusia purba dan informasi yang berkaitan dengan kehidupannya. Dipamerkan juga beberapa fosil manusia purba yang ada di Indonesia sampai dengan kuburan-kuburan unik manusia purba. Salah satu yang dapat dilihat adalah Kubur Prasejarah Gilimanuk disertai benda kesayangan. Rangka manusia prasejarah ini dikuburkan dengan sistem penguburan langsung (*primary*



Berbagai benda koleksi yang ada di Lantai 2

Foto: Disa

kapal, alat-alat astronomi, arsitektur-arsitektur bangunan, alat perlindungan diri dan lain sebagainya.

Lantai 3: Organisasi Sosial dan Pola Pemukimannya

Dalam perjalanannya, manusia meninggalkan berbagai artefak sebagai bukti kehidupannya. Ada yang berupa peralatan sehari-hari, perhiasan, prasasti, benda-benda religi, benda-benda simbol kekuasaan, pakaian, dan lain sebagainya.

Lantai 4: Khasanah Emas dan Keramik

Lantai 4 merupakan ruang yang menyimpan koleksi emas dan keramik. Untuk mencapai lantai empat, tidak tersedia eskalator sehingga hanya bisa dicapai dengan menggunakan lift. Lantai ini merupakan lantai yang cukup berbeda dari lantai-lantai yang ada lainnya, karena di lantai ini para pengunjung dilarang mengambil gambar benda yang dipamerkan.

Terdapat lebih dari 200 item benda-benda koleksi atau sekitar 35 kilogram emas yang meliputi perhiasan, benda-benda upacara, dan mata uang yang kebanyakan berasal dari Khasanah Wonoboyo, yang merupakan temuan arkeologis paling spektakuler abad 20 di Indonesia, dipamerkan di sini. Disebut sebagai Khasanah Wonoboyo karena pada tahun 1990 seorang petani di Wonoboyo, Klaten, Jawa Tengah menemukan harta karun terpendam yang berasal dari periode Jawa Klasik

burial). Di sisi rangka terdapat senjata tajam dari logam berbentuk seperti parang atau mata tombak yang dimungkinkan adalah alat kerja sehari-hari atau benda kesayangannya saat masih hidup.

Lantai 2: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Ekonomi

Lantai 2 merupakan ruang bertemakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi yang menyimpan berbagai koleksi yang menginformasikan pengetahuan umat manusia, khususnya manusia Indonesia, serta teknologi yang menyangkut pengetahuan terapan yang bersifat teknis.

Hal penting lainnya adalah kegiatan ekonomi, salah satu aspek kehidupan manusia yang terkait dengan kegiatan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang serta pelayanan jasa. Ruang pameran ini menampilkan beberapa aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi aksara dan bahasa, sistem hukum, astronomi dan navigasi, arsitektur, pengobatan dan pengolahan makanan, alat perlindungan, alat komunikasi, alat produksi, ekonomi, dan alat transportasi.

Memasuki lantai 2, disuguhkan beberapa koleksi prasasti dari berbagai kerajaan besar di Indonesia, salah satunya adalah Prasasti Mulawarman

yang berasal dari Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur. Prasasti yang beraksara Pallawa dan Berbahasa Sansekerta ini bercerita tentang kebaikan Sang Mulawarman yang memberikan banyak sedekah yang disaksikan para Brahmana.

Selain Prasasti Tugu, ada juga prasasti Ciaruteun peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang menegaskan kedudukan Purnawarman yang diibaratkan Dewa Wisnu yang dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat.

Selain prasasti juga terdapat berbagai macam alat-alat yang pernah diciptakan oleh manusia seperti macam-macam model kapal beserta alat-alat navigasi



Diorama kehidupan pada Zaman Prasejarah.

Foto: Disa

Jalan-jalan



Area halaman museum



Pengunjung yang sedang melihat koleksi di Lantai 2.

Foto: Disa

sekitar abad ke-5 hingga ke-15 Masehi. Harta karun tersebut kebanyakan berupa benda-benda perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, secara keseluruhan beratnya lebih dari 35 kilogram. Harta karun Wonoboyo kemungkinan terpendam lava dari letusan dahsyat Gunung Merapi pada sekitar awal abad ke-10.

Selain melihat benda-benda yang dipamerkan, Museum Nasional Indonesia juga mempunyai agenda kegiatan lainnya yang tak kalah seru, yaitu pameran, lomba-lomba, dan ada juga agenda bulanan di akhir pekan. Untuk kegiatan pameran dan lombanya sendiri biasanya dilaksanakan pada perayaan tertentu, misalnya HUT RI, Hari Pendidikan, Hari Kartini, dan HUT Museum.

Agenda kegiatan yang patut ditunggu dan selalu dinantikan adalah agenda yang dilaksanakan setiap bulannya yang bertajuk "Akhir Pekan @ Museum". Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Museum Nasional Indonesia dan Dapoe D=ongeng yang mempersembahkan pementasan dongeng teater dari Teater Koma. Dongeng yang dipentaskan pun masih

bertema peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia dan juga dapat dinikmati oleh semua usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. **(Disa)**



Perhiasan kuno dalam display



Patung Airlangga yang dipercaya sebagai titisan Dewa Wisnu yang sedang menunggang Garuda.



Diorama rumah tradisional yang terdapat di Lantai 3.

TIPS MENATA RUANG KERJA AGAR NYAMAN



Untuk seorang karyawan yang bekerja di ruangan kerja kantor, yang menganggap bahwa kantor merupakan rumah kedua mereka, pastinya akan berpikir bagaimana agar tercipta suasana yang nyaman sehingga dapat menghasilkan pekerjaan yang optimal. Mulai dari memperhatikan kebersihan, tata ruangan kantor, serta hal lainnya yang membuat kita lebih fokus, tidak mudah stres dan juga membuat mereka lebih semangat dalam bekerja. Berikut tips menata ruang kerja :

1. Memasang Wallpaper di Ruang Kerja

Rata-rata disetiap kantor cat dinding yang mendominasi adalah warna putih atau pun warna kaku lainnya yang terkadang membuat jenuh. Jika Anda ingin ruang kerja tampil beda bisa menambahkan wallpaper yang menarik dan bergambar namun masih dalam batas yang wajar. Dengan adanya tampilan yang berbeda pada dinding ruang kerja biasanya akan membuat *fresh* dan semangat dalam berkerja. Cara menata ruang kerja dengan memasang wallpaper ini sudah banyak dilakukan di beberapa tempat kerja. Dengan begitu ruangan kerja tak terlihat kaku serta menakutkan.

2. Pilih Warna Yang Produktif

Warna telah terbukti dapat

memengaruhi produktivitas di tempat kerja. Walaupun setiap orang memiliki ketertarikan sendiri terhadap warna, namun ada beberapa warna yang ternyata memiliki efek memengaruhi. Misalnya warna biru merangsang pikiran, kuning mendorong penciptaan ide atau kreativitas, merah memengaruhi fisik, hijau menciptakan keseimbangan yang membuat ketenangan, atau merah muda yang dapat memberikan keceriaan dan kenyamanan.

3. Tempatkan Layar Komputer sesuai meja kerja anda

Saat ini hampir di seluruh perusahaan, instansi, dan lembaga menggunakan komputer atau laptop untuk bekerja. Hanya saja, banyak yang menempatkan komputer tersebut dengan posisi yang tidak sesuai. Seperti meja terlalu tinggi atau posisi komputer di bawah posisi mata Anda ketika duduk. Hal tersebut bisa mengakibatkan sakit leher atau tidak nyaman pada anggota tubuh lainnya saat bekerja. Oleh karena itu, cara menata ruang kerja selanjutnya adalah dengan mengubah posisi layar komputer atau meja untuk komputer atau laptop Anda.

Posisi ideal untuk menempatkan layar komputer Anda adalah dengan posisi setinggi mata Anda. Jika memang tidak memungkinkan bisa menggunakan

keyboard bluetooth untuk bisa mengetik di tempat yang nyaman. Dengan begitu, tak akan ada lagi keluhan sakit leher lelah mata, dan sebagainya.

4. Mengatur dan Memperbaiki Pencahayaan Ruang Kantor

Cara menata ruang kerja berikutnya adalah dengan mengatur atau memperbaiki pencahayaan ruangan kantor. Hal ini sangat penting karena akan berdampak pada kesehatan Anda terutama kesehatan mata. Jika Anda merasa ruangan kantor Anda sangat minim pencahayaan bisa ditambahkan dengan memasang lampu yang sesuai. Mengatur atau memperbaiki pencahayaan pun tidak selalu harus menggunakan listrik.

Barangkali ada lemari atau benda lainnya yang menghalangi pencahayaan yang masuk ke ruangan kerja Anda. Karena itu bisa mengubah posisi lemari, tempat duduk atau meja agar pencahayaan alami dari luar bisa masuk ke ruangan kerja Anda. Namun, jika tidak memungkinkan alternatif lain yang bisa dilakukan adalah dengan memasang lampu meja yang kecil agar pencahayaan di meja kantor Anda bisa teratasi dengan baik. **(Indira/berbagai sumber)**

7 Monumen Terkenal di Tanah Air

Monumen merupakan jenis bangunan yang dibuat dengan memiliki multi fungsi. Salah satunya untuk memperingati seseorang atau peristiwa yang dianggap penting dari kejadian pada masa lalu.

Monumen juga kerap berfungsi sebagai suatu upaya untuk memperindah penampilan kota, lokasi tertentu dan menjadi

identitas kota tertentu. Hampir semua kota besar di dunia ini termasuk di Indonesia memiliki monumen.

Berikut 7 monumen terkenal yang memiliki multi fungsi diberbagai daerah di Tanah Air.



1. Monumen Nasional, DKI Jakarta

Monumen Nasional atau yang populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter (433 kaki) yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Sukarno, dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975.

Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah Lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.

2. Monumen Bandung Lautan Api, Kota Bandung

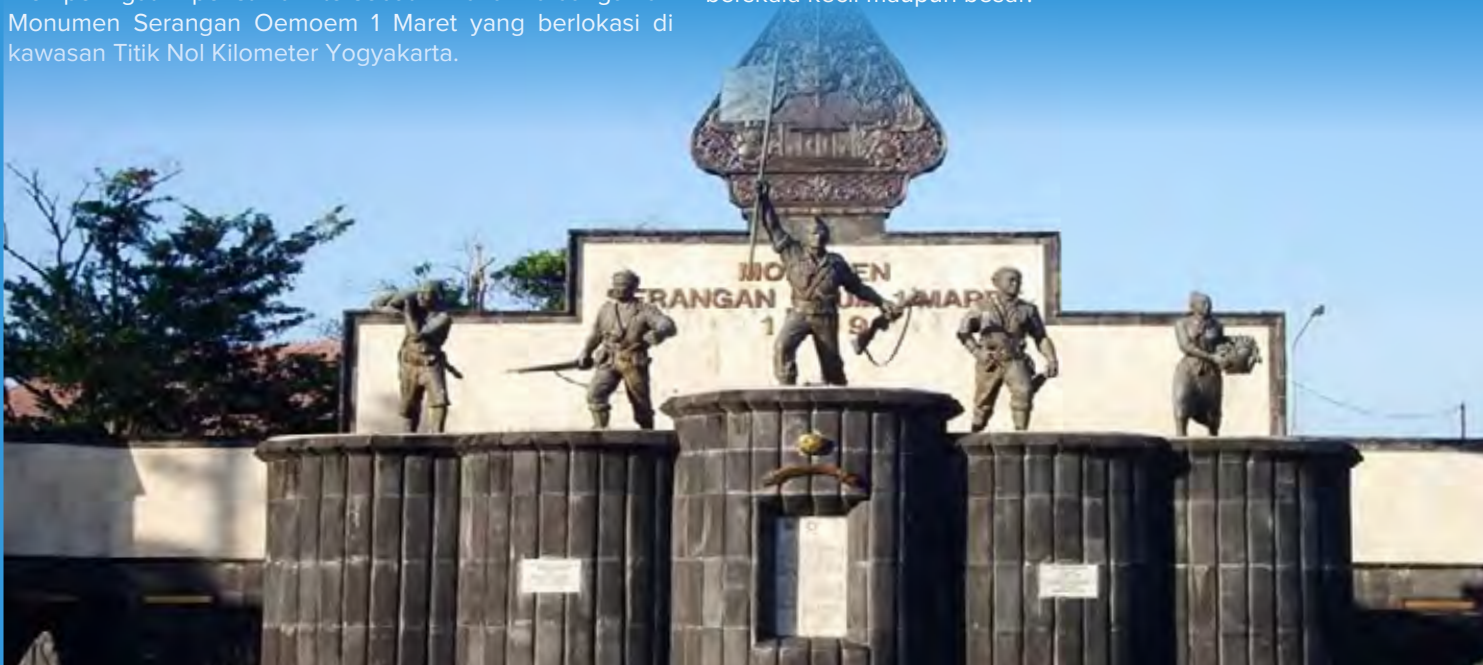
Monumen Bandung Lautan Api merupakan monumen yang menjadi markah tanah Bandung. Monumen ini setinggi 45 meter, memiliki sisi sebanyak sembilan bidang. Monumen ini dibangun untuk memperingati peristiwa Bandung Lautan Api, dimana terjadi pembumihangusan Bandung Selatan yang dipimpin oleh Muhammad Toha. Monumen ini berada di tengah-tengah kota yaitu terletak di kawasan Lapangan Tegallega. Monumen ini menjadi salah satu monumen terkenal di Bandung. Monumen ini menjadi pusat perhatian setiap tanggal 23 Maret mengenang peristiwa Bandung Lautan Api. Monumen ini melekat menjadi identitas Kota Bandung



3. Monumen 1 Maret, Di Yogyakarta

Kota Yogyakarta menjadi salah satu kota dengan peranan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Salah satu peristiwa bersejarah untuk mempertahankan Kemerdekaan Indonesia adalah Serangan Umum 1 Maret 1949. Untuk memperingati peristiwa tersebut maka dibangunlah Monumen Serangan Oemoem 1 Maret yang berlokasi di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Bangunan yang diresmikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada tahun 1973 ini, selain menjadi objek wisata juga dijadikan sabagai tempat perhelatan acara besar seperti konser musik dan pertunjukan seni budaya yang berskala kecil maupun besar.



4. Tugu Khatulistiwa, Kota Pontianak

Titik khatulistiwa memang sangat identik dengan Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Tugu ini memiliki keunikan, yakni tanpa bayangan karena ada fenomena alam yang terjadi dua kali dalam satu tahun, yaitu antara tanggal 21-23 Maret dan 21-23 September. Fenomena yang terjadi adalah posisi matahari berada tepat di kepala sehingga menyebabkan bayangan benda-benda di permukaan bumi tidak tampak. Selain itu, kulminasi matahari juga menghasilkan gaya yang cukup kuat sehingga membuat telur tegak lurus di titik nol derajat.



5. Monumen Mandala, Makassar

Monumen ini dibangun pada tahun 1994 dan selesai di tahun 1996 untuk mengenang jasa pahlawan dalam pembebasan Irian Barat dari tangan para penjajah dan hadiah atas jasa Presiden Indonesia ke-2, yaitu Presiden Soeharto dalam mengatur strategi untuk membebaskan Irian Barat saat menjadi panglima komando Mandala.

Monumen yang berlokasi di pusat Kota Makassar ini menjulang setinggi 75 meter, terdiri dari empat lantai. Lantai satu sampai dengan lantai tiga berisikan tentang barang-barang yang menggambarkan sejarah proses pembebasan Irian Barat, sedangkan di lantai empat adalah ruang pandang untuk pengunjung dapat melihat suasana kota Makassar dari ketinggian.

Pada bagian bawah monumen, terdapat relief lidah api yang menjadi simbol semangat dari Trikora. Sementara relief yang sama di bagian atas melambangkan semangat yang tidak pernah padam. Selain itu ada 27 patung batang bambu runcing sebagai simbol instrumen perjuangan fisik rakyat saat itu.



6. Monumen Bom Bali, Bali

Indonesia pernah berduka dengan adanya serangan teror berupa sebuah ledakan bom besar di Bali yang menelan korban meninggal dan luka-luka lebih dari 400 orang di tahun 2002. Bom yang meledak di sebuah tempat hiburan di Kawasan Kuta ini menjadikan tragedi ini tragedi paling hitam sepanjang tahun 2002.

Tragedi ini tidak bisa dilupakan begitu saja, sehingga dibangunlah monumen Bom Bali di tahun 2003 dan diresmikan di tahun 2004. Titik perhatian utama dari monumen ini adalah plakat besar berisi 202 nama korban yang meninggal lengkap dengan asal negaranya.

Berlokasi di Jalan Legian, Kuta dan di sekitar toko-toko sehingga monumen ini menjadi destinasi baru yang strategis.



7. Monumen Palagan Ambarawa, Semarang

Monumen Palagan Ambarawa merupakan monumen yang terdapat di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Monumen ini merupakan simbol untuk mengenang sejarah pertempuran Palagan Ambarawa pada tanggal 12 Desember-15 Desember 1945 Ambarawa. Pasukan Sekutu yang terdesak dari Magelang mengadakan pengunduran ke Ambarawa, dan pasukan TKR yang dipimpin Kolonel Soedirman berhasil menghancurkan Sekutu pada tanggal 15 Desember 1945, di mana kini diperingati sebagai Hari Infanteri.

Monumen Palagan Ambarawa dibangun pada tahun 1973 dan diresmikan pada 15 Desember 1974 oleh Presiden Soeharto. Gambaran singkat sejarah pertempuran bisa dilihat pada relief yang dibuat pada dinding Monumen Palagan Ambarawa. **(Syifa/*berbagai sumber)**





Jalanan di Lido, Sukabumi telah diuji coba menggunakan teknologi aspal karet.

Teknologi Aspal Karet

Indonesia merupakan negara penghasil karet nomor dua terbesar di dunia setelah Thailand. Produksi karet alam Indonesia saat ini sekitar 3,2 juta ton dengan luas lahan perkebunan sekitar 3,4 juta hektar. Produksi karet dalam negeri sekitar 85 persen masih di ekspor dalam bentuk karet mentah dan sisanya untuk konsumsi dalam negeri.

Kementerian PUPR melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Kementerian Perindustrian berupaya memanfaatkan karet alam dalam bidang infrastruktur, salah satunya sebagai bahan tambah untuk aspal (aspal karet).

Rendahnya permintaan ekspor karet mentah menyebabkan kelebihan suplai dalam negeri, sehingga harga karet turun drastis.

Salah satu upaya untuk menstabilkan harga karet adalah dengan meningkatkan konsumsi domestik.

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian PUPR melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Kementerian Perindustrian berupaya memanfaatkan karet alam dalam bidang infrastruktur, salah satunya sebagai bahan tambah untuk aspal (aspal karet).

Hasil monitoring dan uji coba lapangan menunjukkan bahwa pada perkerasan dengan aspal karet muncul bercak-bercak putih dan mulai terjadi kerusakan pada umur 18 bulan sampai kinerjanya dibawah



Ujicoba penggunaan aspal karet telah dilakukan pada pelapisan ulang jalan di Lido, Sukabumi, Jawa Barat dengan kandungan karet alam sebesar 7 persen. Dalam satu ton campuran beraspal panas dapat dimanfaatkan kurang lebih sebanyak 4,2 kilogram karet alam.

perkerasan dengan aspal Pen 60. Hal ini disebabkan karena masih digunakan karet alam yang belum melalui proses vulkanisasi, sehingga mudah mengalami penuaan oleh sinar ultra violet.

Kerusakan dini jalan aspal dan beton disebabkan aspal memiliki kelemahan, karena memiliki viskositas rendah dan tidak tahan terhadap panas, radiasi dan oksidasi. Sedangkan beton juga memiliki kelemahan yang disebabkan kekerasan yang terlalu tinggi, elastisitas yang sangat rendah dan daya lekat yang lemah. Peningkatan mutu aspal dan beton sudah biasa dilakukan yaitu dengan cara memodifikasinya dengan penambahan bahan tambah atau aditif (modifier) seperti serat selulosa dan polimer.

Aspal karet merupakan teknologi aspal modifikasi elastomer yang menggunakan karet alam vulkanisasi (cross-link) sebagai bahan modifier-nya.

Tahun 2015, Kementerian PUPR bersama Kementerian Perindustrian dan Puslit Karet melakukan pengembangan aspal karet sebagai modifier aspal. Kemudian pada tahun 2017 dilakukan penghamparan di beberapa tempat. Penghamparan yang dilakukan antara lain pada ruas jalan raya Parung – Depok pada Minggu dini hari, 5 November 2017. Penghamparan sepanjang 500 m untuk perkerasan aspal karet padat *masterbatch* dan 100 m untuk perkerasan aspal Pen 60 sebagai pembanding.

Ujicoba penggunaan aspal karet telah dilakukan pada pelapisan ulang jalan di Lido, Sukabumi, Jawa Barat dengan kandungan karet alam sebesar 7 persen. Dalam satu ton campuran beraspal panas dapat dimanfaatkan kurang lebih sebanyak 4,2 kilogram karet alam.

Keunggulan dari teknologi ini dapat meningkatkan ketahanan aspal terhadap temperatur dan juga dapat meningkatkan ketahanan campuran beraspal terhadap deformasi. Keunggulan lainnya adalah dapat meningkatkan konsumsi pemakaian karet alam dalam negeri dan meningkatkan ketahanan lelah pada campuran beraspal. Tidak hanya itu, keunggulan teknologi aspal karet ini yakni mengurangi terjadinya pelepasan butir dan pemanfaatan modifier alam lokal.

Kementerian PUPR pada tahun ini juga akan menerapkan campuran aspal dengan komoditas karet sebagai upaya pemanfaatan karet alam dalam negeri. Penerapan teknologi aspal karet akan diimplementasikan pada paket pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Muara Beliti – Batas Kabupaten Musi Rawas - Tebing Tinggi - Bts Kota Lahat dengan total panjang 8,33 km yang ada di Sumatera Selatan. **(Sumber : <http://litbang.pu.go.id>)**





Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono dengan Sekretaris BPIW, Firman H. Napitupula.



Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono bersalaman dengan pegawai di lingkungan Kementerian PUPR.



Penyanyi Ikgang Fawzi turut memeriahkan acara halalbihalal.



Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW, Lana Winayanti (pakaian putih) bersalaman saat halalbihalal di Kementerian PUPR.



Penyanyi religi, Opick memeriahkan acara halalbihalal.

BPIW BERPARTISIPASI PADA HALAL BIHALAL KEMENTERIAN PUPR

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) turut berpartisipasi dalam halalbihalal yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada hari pertama masuk kerja setelah libur panjang Lebaran 2018, Kamis (21/6/2018). Acara halal bihalal yang digelar di lingkungan Kementerian PUPR ini turut dimeriahkan sejumlah penyanyi Opick dan Ikgang Fawzi.



Direktur Jenderal Cipta Karya, Sri Hartoyo dalam pembukaan Pameran Indo Water.



Direktur Jenderal Cipta Karya, Sri Hartoyo mengunjungi booth PUPR.



Pengunjung mengikuti kuis di dalam booth PUPR.



Beberapa mahasiswa sedang mendengarkan penjelasan mengenai materi panel BPIW.

PAMERAN INDO WATER DI SURABAYA

Dalam rangka menyebarkan informasi produk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Sub Bagian Layanan Informasi BPIW dalam koordinasi Biro Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, turut serta dalam pameran Indo Water, Indo Waste, Indo Renergy 2018 Expo & Forum di Grand City Convex Surabaya yang berlangsung pada (28-30/6) lalu.

Dalam pameran ini dibahas mengenai teknologi air, limbah cair dan daur ulang yang berkembang pesat di Indonesia. BPIW menampilkan panel Pengembangan Kawasan Metropolitan GERBANGKERTOSUSILA. Pameran Indo Water, Indo Waste, IndoRenergy 2018 yang diselenggarakan oleh perusahaan Napindo Media Ashatama ini dihadiri mahasiswa, pegawai, wiraswasta, akademisi, umum, dll.

Obras

Bang Egi merupakan tokoh kartun dalam Obras, dan Egi juga sapaan akrab dari "Sinergi".

BANG EGI





TEBAK KATA

K	W	S	E	K	T	O	R	K	H	M	A
A	I	O	G	J	P	M	P	A	G	E	H
W	B	S	Y	U	C	A	Q	K	O	T	A
A	U	E	I	N	K	S	O	N	K	R	I
S	N	A	F	N	O	T	R	U	M	O	G
A	T	X	I	V	E	E	P	I	H	P	A
N	E	P	R	O	G	R	A	M	S	O	K
T	U	K	J	A	I	P	G	W	A	L	S
F	G	R	E	H	P	L	J	I	P	I	H
R	E	N	S	T	R	A	T	O	U	T	R
V	U	R	A	H	O	N	G	M	P	A	S
O	P	X	G	A	S	M	I	T	A	N	G

Terdapat 8 kata terkait BPIW di dalam Scramble Word berikut, temukan maksimal 5 kata !

KETENTUAN

Dua orang pemenang akan mendapatkan *souvenir cantik* dari BPIW. Jawaban berupa FOTO/ SCAN disampaikan melalui : humasbpiw@pu.go.id atau *WhatsApp No: 0812-9897-4748*. Sertakan *scan KTP/identitas lainnya, nomor kontak, dan alamat pengiriman souvenir*. Jawaban dan nama pemenang akan diumumkan pada edisi 31, Juli 2018.

JAWABAN KUIS EDISI 29

- | | |
|----------------|--------------|
| Mendatar : | Menurun : |
| 1. RUSUS | 1. Mandalika |
| 2. Rambut Siwi | 2. MBR |
| 3. Sarbagita | 3. Holtekamp |
| 4. MPDP | 4. Sigli |
| 5. Wini | 5. Papeda |
| 6. Serayu | 6. IPAL |

PEMENANG KUIS EDISI 29

- Lathifah zahratul Jannah
Jl. Arum Dalu, Kedaung, Pamulang
- Anggi Septia Nizarwan
Jl. Nusantara, Sepang Jaya, Labuhan Ratu



Soslawati, ST, MT

Berupaya Mewujudkan Sinkronisasi Program dalam Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah dengan pembangunan infrastruktur PUPR dan di Tanah Air. Pasalnya, BPIW berperan untuk mewujudnya keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi program dalam pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR.

Kepala Bidang Penyusunan Program, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Soslawati, ST, MT ini meyakinkan, keberadaan infrastuktur yang terpadu dan sinkron dalam satu kawasan akan membuat belanja infrastruktur yang dilakukan negara menjadi efektif dan efisien.

Wanita berjilbab penerima penghargaan Satyalancana Karya Satya tahun 2016 ini menilai, BPIW sebagai organisasi unit kerja eselon I yang baru berdiri tiga tahun tentunya perlu terus mengoptimalkan kinerja. "Selalu ada terobosan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja," ungkapnya.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja BPIW, wanita yang sudah 17 tahun mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini mengakui, hal utama yang dilakukannya adalah berupaya meningkatkan kinerja tim di bidang yang dipimpinnya.

Artinya, lanjut Soslawati, pihaknya senantiasa mendorong tim dalam jajarannya agar dapat bekerja optimal sesuai tujuan organisasi dan harapan para pimpinan.

"Saya yakin semua orang itu bisa berkinerja baik dan bekerja optimal. Asalkan mereka itu memiliki komitmen dan totalitas dalam bekerja," terangnya.

Istri dari Yahya Rohman Ali ini mengaku, untuk mendorong jajaran di bawahnya terampil dalam tugasnya. Dirinya

mencoba melakukan berbagai hal yang dianggap penting. "Salah satunya saya senantiasa melakukan koordinasi dengan para pihak dalam melakukan sinkronisasi program serta memberikan pembelajaran kepada staf dengan melibatkan dalam rapat koordinasi dan kegiatan lainnya yang dapat menunjang optimalisasi

kinerja," terang Soslawati.

Selain itu, Soslawati juga selalu menekankan pada jajarannya agar memahami terhadap tugas pokok dan fungsi yang diemban bidangnya, yakni antara lain melakukan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR. Ia mengakui, jam terbang dan kematangan pengalaman di lapangan akan sangat membantu dalam menunjang kinerja bidangnya.**)

Penerima penghargaan Satyalancana Karya Satya tahun 2016 ini menilai, BPIW sebagai organisasi unit kerja eselon I yang baru berdiri tiga tahun tentunya perlu terus mengoptimalkan kinerjanya.



Pengalaman Tangani Kontrak Tahun Jamak APBN Pertama Banjir Kanal Timur DKI Jakarta dan Rehabilitasi Bendungan Situ Gintung

Pengalaman pertama selalu tertanam kuat pada memori seorang. Hal itu pula yang dirasakan, Sosilawati saat menangani proyek pertama yang menggunakan Kontrak anggaran tahun jamak. "Proyek pertama APBN yang menggunakan Kontrak anggaran tahun jamak adalah proyek Banjir Kanal Timur (BKT)," terang Sosilawati antusias. Proyek ini menggunakan sumber daya yang bersumberkan dari Anak Bangsa Indonesia.

Ia menceritakan, kebetulan dirinya turut menangani proyek tersebut sebagai Asisten Pelaksanaan Proyek Banjir Kanal Timur. Saat menangani proyek tersebut dirinya benar-benar memfokus untuk proyek BKT. "Saat di kantor saya benar-benar menyiapkan diri penanganan proyek tersebut. Artinya, kapan pun saya siap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran selesainya proyek BKT," kenangnya.

Bukan tanpa alasan bagi Sosilawati untuk betul-betul fokus dalam penanganan BKT saat itu. Sebab, penanganan BKT merupakan proyek yang menyedot APBN cukup besar, proyek pertama di Indonesia dengan Kontrak tahun jamak APBN merupakan karya anak

bangsa Indonesia dan hasil dari pembangunan tersebut ditunggu banyak pihak, terutama masyarakat Jakarta yang menjadi korban banjir.

"Dengan fokus dan komitmen kuat, Alhamdulillah proses itu telah terlalui dan hasil yang lumayan. Kalau terkenang lagi, bagaimana proses konsultasi dan koordinasi untuk BKT itu masih suka terharu saja," terangnya.

Selain itu, pengalaman lain yang cukup terkesan sampai saat ini adalah penanganan jebolnya Situ Gintung di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. "Saat ada perintah penanganan terhadap situ itu, saya baru masuk setelah cuti melahirkan," terangnya, Saat itu sebagai Kasi Perencanaan & Program dan merangkap PPK Perencanaan bertanggung jawab untuk menyiapkan perencanaan rehabilitasi bendungan situ gintung.

Lebih lanjut, ia menceritakan, saat itu terasa ada semangat lebih, sehingga walau baru masuk kerja setelah cuti melahirkan Sosilawati sanggup untuk melakukan survey topografi mulai dari awal jebolnya situ gintung sampai kesungai pesanggrahan.

"Saat itu, anak saya bawa ke lapangan untuk survey tapi dijaga oleh orang yang sudah saya tugaskan. Saya melakukan survey seperti biasa, seolah bukan baru masuk cuti melahirkan. Itu bisa karena merasa ada energi lebih dari rasa semangat," terang Sosilawati. (**)

"Dengan fokus dan komitmen kuat, Alhamdulillah proses itu telah terlalui dan hasil yang lumayan. Kalau terkenang lagi, bagaimana proses konsultasi dan koordinasi untuk BKT itu, masih suka terharu saja," terangnya.



**Buletin Sinergi ini dapat didownload melalui:
bpiw.pu.go.id/publication/bulletin**



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR**

